



**Analisis Ekualisasi SPT Masa PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 Ayat (2) Final  
Dan PPN Dalam Menjawab SP2DK Pada PT X Konstruksi  
Jakarta Timur Tahun 2016 (Studi Kasus)**

**Devy Yolanda Gunawan<sup>1</sup> Hanif Ismail<sup>2</sup>**

Mahasiswa Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia. Corresponding Author. Email: devyolanda06@gmail.com  
Dosen Program Studi Akuntansi, Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Indonesia. Email: hanif.ismail@kwikkiangie.ac.id

**Abstrak**

Self Assessment mendorong Wajib Pajak untuk mandiri dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pada pelaksanaannya meskipun terdapat ketentuan, tetapi tetap terdapat kemungkinan terjadinya kekeliruan atau kesalahan, baik dari perhitungan, penyeteroran hingga pelaporannya. Dalam menghindari adanya permasalahan tersebut, pihak pajak akan melakukan ekualisasi pajak yaitu, menyamakan antara pajak yang telah disetorkan dan dilaporkan berdasarkan SPT Tahunan dengan SPT Masa yang telah dilaporkan oleh Wajib Pajak. Setelah dilakukan ekualisasi pajak apabila terdapat dugaan bahwa ada ketidaksesuaian, maka akan diterbitkannya Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan pihak perpajakan. Wajib Pajak akan melakukan hal yang serupa dengan pihak perpajakan yaitu melakukan ekualisasi yang akan membantu mengoptimalkannya dalam memperoleh titik keseimbangan antara data yang diduga keliru dengan data-data yang tersedia berdasarkan kelengkapan, keaslian serta kebenarannya.

**Abstract**

*Self-assessment encourages Taxpayers to be independent in fulfilling their tax obligations. In its implementation, despite the provisions, there is still the possibility of errors, both from calculations deposits to reporting. In avoiding this problem, the tax party performs tax equalization, namely, equating the tax that has been deposited and reported based on the Annual SPT with the Periodic SPT that has been reported by the Taxpayer. After the tax equalization is carried out if it is suspected that there is a discrepancy, a Letter of Explanation on Data and/or Information (SP2DK) will be issued as a form of supervision carried out by the tax authorities. Taxpayers will do the same thing as the tax authorities, namely doing equalization which will optimize the Taxpayer in obtaining a balance point between erroneous data and available data based on the truth, as well as the truth.*

**Key word:** Tax Equalization, SP2DK, PPh Article 23, PPh Article 4 Paragraph (2) Final, VAT.

**1. Pendahuluan**

Suatu bentuk andil yang dapat masyarakat negara lakukan ialah memenuhi kewajiban dalam membayar pajak. Pajak tersebut merupakan hal yang memiliki peran penting bagi negara yaitu sebagai sumber pendapatan utama bagi Negara dan sumber yang mempengaruhi peningkatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan ketentuan perpajakan, sistem perpajakan yang dianut Indonesia ialah sistem Self Assessment.

Menurut (Sumarsan, 2015) menjelaskan bahwa self assessment merupakan suatu sistem perpajakan mengenai pemungutan pajak yang memberikan wewenang, kepercayaan, dan tanggung jawab penuh kepada Wajib Pajak untuk melakukan perhitungan, lalu membayar, dan melaporkan sendiri besarnya kewajiban pajak terutang yang harus dipenuhi. Self Assesment mendorong Wajib Pajak untuk mandiri dalam memenuhi kewajiban pajak. Pada perhitungan perpajakan yang dilakukan Wajib Pajak, besaran pajak yang akan disetorkan harus mengikuti peraturan yang ditentukan dalam undang-undang pajak yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Meskipun terdapat ketentuan yang perlu di patuhi

© Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Seluruh isi buku ini tanpa penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. Hak cipta dilindungi Undang-Undang. Seluruh isi buku ini tanpa penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh isi buku ini untuk penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



oleh Wajib Pajak, tetapi selama pelaksanaan menjalankan sistem ini terdapat kemungkinan terjadinya kekeliruan atau kesalahan, baik dari perhitungan, penyeteroran hingga pelaporannya. Dalam menghindari adanya permasalahan ini pihak pajak senantiasa dalam setiap tahun pajak akan melakukan ekualisasi pajak yaitu, menyamakan antara pajak yang telah disetorkan dan dilaporkan berdasarkan SPT Tahunan dengan SPT Masa yang telah dilaporkan juga selama masa pajak dan pos-pos pengeluaran serta pendapatan perusahaan. Setelah dilakukannya ekualisasi pajak, apabila terdapat dugaan bahwa ada ketidaksesuaian, maka akan diterbitkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (SP2DK) sebagai bentuk pengawasan yang dilakukan pihak perpajakan. SP2DK hanya berbentuk surat yang masih memberikan kesempatan bagi Wajib Pajak dalam melakukan pembuktiannya secara pribadi, tidak melalui pihak pemeriksa pajak.

Perusahaan yang menerima SP2DK akan menelusuri dugaan yang dimaksudkan dan melakukan ekualisasi. Tidak terdapat definisi ekualisasi pajak secara teoritis. Tetapi terdapat dasar hukum mengenai ekualisasi pajak yaitu tertera pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-4/PJ/2012, dimana ekualisasi disebutkan dalam Pasal 4 Nomor (1) Huruf H sebagai teknik pemeriksaan pajak yang dapat digunakan oleh Pemeriksa Pajak. Ekualisasi pajak dapat diartikan sebagai suatu proses untuk mengecek kesesuaian data pajak antara satu jenis pajak dengan jenis pajak yang lainnya, yang tentunya saling memiliki hubungan. Hubungan tersebut yaitu antara data-data pajak yang satu dengan data pajak lainnya ataupun data pembukuan. Ekualisasi ini membantu perusahaan dalam memperoleh titik keseimbangan antara data yang dinyatakan keliru dengan data-data yang tersedia dalam perusahaan.

PT X Konstruksi pada bulan September 2021 silam memperoleh SP2DK atas pajak yang telah dilaporkan di tahun 2016. PT X Konstruksi telah diduga adanya kesalahan pelaporan dalam beberapa pos pajak yang terdapat pada laporan SPT Tahunan yaitu terkait PPh dengan pos pengeluaran dan pendapatan dan PPN. Pada saat itu penulis sedang melakukan magang kerja, sehingga penulis membantu tim bagian perpajakan dalam menelusuri, mengekualisasi hingga menjawab SP2DK tersebut. Karena data sudah selesai dan sesuai maka penulis diperbolehkan atas fenomena terkait ekualisasi dalam menjawab SP2DK tersebut dijadikan sebagai topik penelitian.

### 1.1. Pajak

Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 yang telah diubah menjadi UU No. 16 Tahun 2009 dan diubah kembali dengan UU No. 7 Tahun 2021 yang saat ini berlaku, dapat dinyatakan bahwa “Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

### 1.2. Pajak Penghasilan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan, yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, diperbaharui kembali menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang saat ini berlaku ialah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, menyatakan bahwa Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi atau perseorangan dan badan berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak.

### 1.3. Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 yang sudah diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan atas penghasilan di bawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, Bentuk Usaha Tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak wajib membayarkan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### 1.4. Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 (Final)

Menurut (Siswanto & Tarmidi, 2021, p. 21) PPh Pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan atas jenis penghasilan-penghasilan tertentu yang diatur dalam UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (2), penghasilan ini bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang.

#### 1.5. Pajak Pertambahan Nilai

Menurut (Hidayat & Purwana, 2018) PPN merupakan pajak atas konsumsi dalam negeri baik itu Barang Kena Pajak (BKP dan/atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan selama dalam daerah pabean. Pajak tersebut bersifat tidak langsung dan Objektif.

#### 1.6. Surat Pemberitahuan (SPT)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 mengenai KUP Pasal 1 angka 11 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor 152/PMK.03//2009, Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### 1.7. Ekualisasi Pajak

dasar hukum mengenai ekualisasi pajak yaitu tertera pada Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor PER-4/PJ/2012, dimana ekualisasi disebutkan dalam Pasal 4 Nomor (1) Huruf H sebagai teknik pemeriksaan pajak yang dapat digunakan oleh Pemeriksa Pajak. Menurut (Anwar, 2014) dalam buku Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus, Ekualisasi Pajak merupakan aktivitas mencocokkan data pada Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan pos pajak atau pos biaya yang terdapat di buku-buku pengeluaran biaya, ini dilakukan secara terperinci dalam setiap transaksi yang terjadi, yang memiliki hubungan dalam pembukuan dan/atau laporan jenis pajak lainnya baik sebagian maupun keseluruhan.

#### 1.8. SP2DK

SP2DK menurut Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-39/PJ/2015, merupakan surat yang diterbitkan oleh KPP dalam upaya meminta penjelasan atas data dan/atau keterangan terkait perkiraan data-data yang belum dipenuhi oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### 2. Metode Penelitian

Objek yang diambil dalam penelitian ini ialah PT X Konstruksi Jakarta. Objek yang akan diamati yaitu SPT Masa PPh pasal 23, PPh pasal 4 ayat 2 dan SPT PPN serta dokumen-dokumen lain seperti faktur pajak dan nota sebagai data-data yang diperlukan dalam menjawab SP2DK yang telah diterbitkan kepada perusahaan PT X Konstruksi Tahun 2016.

#### 2.1. Variabel Penelitian

##### 2.1.1 SPT Masa PPh 23

SPT Masa PPh 23 sebagai variabel yang akan diteliti guna menjawab pos-pos pembiayaan PPh 23 yang dianggap tidak sesuai dengan SPT Tahunan 2016 terkait pajak atas sewa dalam PT X Konstruksi.

##### 2.1.2 SPT Masa PPh 4 Ayat 2





- a. Terdapat dugaan berupa adanya selisih biaya bunga yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan pada SPT Tahunan PPh Badan dengan nilai DPP/Objek Pajak terkait bunga yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau PPh Pasal 4 ayat (2), dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Hasil Ekualisasi Perpajakan Terkait Bunga Yang Dilaporkan**

Tahun Pajak	Jumlah Biaya Bunga Pinjaman cfm SPT Tahunan Lampiran II	Nilai Objek Pajak Terkait Bunga Pinjaman (cfm SPT Masa PPh Pasal 23)	Nilai Objek Pajak Terkait Bunga Pinjaman (cfm SPT Masa PPh Pasal 4 ayaut 2)	Jumlah Nilai Objek Pajak terkait Bunga	Selisih
2016	Rp1.429.166.667	-	-	-	Rp1.429.166.667

Sumber : SP2DK PT X Konstruksi, data diolah

Perusahaan mengatakan bahwa pihak pajak menduga terkait biaya bunga tersebut merupakan bunga afiliasi. Menurut Pak Sugih selaku bagian perpajakan yang memegang Pajak Pertambahan Nilai, Bunga Afiliasi merupakan bunga yang dibayarkan atas pinjaman yang dilakukan dalam lingkup hubungan istimewa antara perusahaan dengan perusahaan afiliasi. Dalam hal tersebut, yaitu terkait bunga pinjaman yang dibayarkan PT X Konstruksi kepada PT X Persero sebagai induk perusahaan, sehingga perusahaan wajib dikenakan PPh Pasal 23 atas bunga pinjaman dengan tarif pajak 15%. Perusahaan diduga tidak melakukan perhitungan, penyetoran dan pelaporan terkait bunga afiliasi tersebut.

Jumlah atas biaya bunga pinjaman ini dapat ditelusuri dan dilakukan rekapan. Berikut rincian per pos biaya bunga :

**Tabel 4.2**  
**Rekapitulasi Atas Biaya Bunga Pinjaman**

Tanggal	Bulan	Tahun	Uraian	Rupiah
25/01/2016	01	2016	INDONESIA EXIM BANK	38.888.889
25/01/2016	01	2016	INDONESIA EXIM BANK	38.888.889
25/01/2016	01	2016	INDONESIA EXIM BANK	45.833.333
31/01/2016	01	2016	BNI 46	62.500.000
23/02/2016	02	2016	INDONESIA EXIM BANK	43.055.556
23/02/2016	02	2016	INDONESIA EXIM BANK	43.055.556
23/02/2016	02	2016	INDONESIA EXIM BANK	43.055.556
29/02/2016	02	2016	BNI 46	62.500.000
22/03/2016	03	2016	INDONESIA EXIM BANK	40.277.778
22/03/2016	03	2016	INDONESIA EXIM BANK	40.277.778
22/03/2016	03	2016	INDONESIA EXIM BANK	40.277.778
31/03/2016	03	2016	BNI 46	62.500.000
20/04/2016	04	2016	INDONESIA EXIM BANK	86.111.111
30/04/2016	04	2016	BNI 46	20.833.333
24/05/2016	05	2016	INDONESIA EXIM BANK	83.333.333
31/05/2016	05	2016	BNI 46	20.833.333
16/06/2016	06	2016	INDONESIA EXIM BANK	91.666.667
18/07/2016	07	2016	INDONESIA EXIM BANK	77.777.778
31/07/2016	07	2016	BNI 46	41.666.667

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.

Hak cipta milik IBKKG (Indonesian Business Kwik Kian Gie) dan dilindungi undang-undang. Tidak diperbolehkan untuk disebarluaskan atau digunakan untuk tujuan komersial.



23/08/2016	08	2016	INDONESIA EXIM BANK	86.111.111
31/08/2016	08	2016	BNI 46	20.833.333
30/09/2016	09	2016	BNI 46	20.833.333
18/10/2016	10	2016	INDONESIA EXIM BANK	80.555.556
31/10/2016	10	2016	BNI 46	20.833.333
21/11/2016	11	2016	INDONESIA EXIM BANK	86.111.111
30/11/2016	11	2016	BNI 46	20.833.333
14/12/2016	12	2016	INDONESIA EXIM BANK	88.888.889
30/12/2016	12	2016	BNI 46	20.833.333
<b>TOTAL</b>				<b>1.429.166.667</b>

Sumber : Data diolah

Dari hasil rekapitulasi terkait Biaya Bunga Pinjaman, akan dilakukan ekualisasi, yaitu menyamakan total yang dicantumkan pada SP2DK dengan hasil rekapitulasi, yaitu :

Jumlah Biaya Bunga Pinjaman cfm SPT Tahunan Badan	= Rp1.429.166.667
Jumlah Hasil Rekapitulasi	= <u>Rp1.429.166.667</u>
Selisih	= Rp0

Selisih menunjukkan bahwa hasil ekualisasi tidak terdapat perbedaan antara data yang ditarik perpajakan dengan rekapan data atas biaya bunga pinjaman.

- b. Terdapat selisih biaya sewa yang dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan pada SPT Tahunan PPh di lampiran II dengan akumulasi nilai objek pajak PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Final yang dilaporkan dalam SPT Masa, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 4.3**

**Hasil Ekualisasi Perpajakan Terkait Biaya Sewa**

Tahun Pajak	Jumlah Biaya Sewa cfm SPT Tahunan Lampiran II	Nilai Objek Pajak Terkait Sewa (cfm SPT Masa PPh Pasal 23)	Nilai Objek Pajak Terkait Sewa (cfm SPT Masa PPh Pasal 4 ayat 2)	Jumlah Nilai Objek Pajak terkait Sewa	Selisih
2016	Rp24.550.269.700	Rp23.134.615.977	Rp1.139.707.616	Rp24.274.323.593	Rp275.946.107

Sumber : SP2DK PT X Konstruksi, data diolah

Dari sistem pajak telah menjumlahkan terkait total Nilai Objek Pajak yang dilaporkan dalam SPT Masa baik itu PPh 23 dan PPh 4 ayat (2) yaitu Rp23.134.615.977 dan Rp1.139.707.616, sehingga jika ditotal menjadi Rp24.274.323.593 angka tersebut berselisih jika dibandingkan dengan nominal yang terlampir pada SPT Tahunan Badan dalam lampiran-II Nomor 5 terkait Biaya Sewa yaitu Rp24.550.269.700. Terdapat selisih Rp275.946.107 yang diduga belum dilaporkan dalam SPT Masa. Menurut Ka Salsa total jumlah biaya sewa yang tercantum dalam SPT Tahunan Badan mengandung tiga jenis PPh yaitu PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) Final dan PPh Pasal 15, dengan empat jenis sewa yaitu Sewa Bangunan, Sewa Kendaraan, Sewa Peralatan, dan Sewa Pesawat.

Peneliti akan menjabarkan terkait rincian atas biaya sewa dalam masing-masing jenis pajaknya yaitu PPh Pasal 23, PPh Pasal 4 ayat (2) Final, dan PPh Pasal 15, berikut daftar rekapan yang diperoleh dari SPT Masa tahun 2016 yang telah dilaporkan perusahaan.

- 1) Rekapan SPT Masa PPh Pasal 23 tahun 2016

1. Prorogatif mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Tabel 4.4

**Rekapan Penghasilan Bruto Biaya Sewa PPh Pasal 23**

	<b>PENGHASILAN BRUTO</b>	<b>PPh Pasal 23</b>	<b>Tarif</b>
Januari	2.222.116.421	49.088.501	2%
Februari	2.324.798.168	49.979.815	2%
Maret	1.439.980.561	30.792.396	2%
April	1.435.041.735	32.050.394	2%
Mei	2.169.536.832	45.905.591	2%
Juni	2.113.906.822	44.124.458	2%
Juli	878.890.984	21.370.640	2%
Agustus	3.129.181.563	70.006.383	2%
September	2.274.432.959	48.547.189	2%
Oktober	2.494.572.979	63.128.661	3%
November	1.380.137.215	30.599.989	2%
Desember	864.595.045	21.604.421	2%
<b>TOTAL</b>	<b>22.727.191.284</b>	<b>507.198.438</b>	

Sumber : Data diolah

2) Rekapan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Final tahun 2016

Tabel 4.5

**Rekapan Penghasilan Bruto Biaya Sewa PPh Pasal 4 Ayat (2) Final**

	<b>PENGHASILAN BRUTO</b>	<b>PPh Pasal 4 Ayat (2)</b>	<b>Tarif</b>
Januari	203.389.844	20.338.984	10%
Februari	140.444.443	14.044.444	10%
Maret	125.327.221	12.532.722	10%
April	40.497.165	4.049.716	10%
Mei	24.788.334	2.478.833	10%
Juni	41.155.001	4.115.501	10%
Juli	55.233.333	5.523.333	10%
Agustus	242.099.994	24.209.999	10%
September	73.477.777	7.347.777	10%
Oktober	67.972.221	6.797.222	10%
November	54.491.106	5.449.112	10%
Desember	70.831.177	7.083.120	10%
<b>TOTAL</b>	<b>1.139.707.616</b>	<b>113.970.763</b>	

Sumber : Data diolah

3) Rekapan SPT Masa PPh 15 tahun 2016

Tabel 4.6

**Rekapan Penghasilan Bruto Biaya Sewa PPh Pasal 15**

	<b>PENGHASILAN BRUTO (Rp)</b>	<b>PPh Pasal 15 (Rp)</b>	<b>TARIF</b>
Januari			
Februari			
Maret			
April			
Mei			
Juni			
Juli			

1. Ditaring mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Agustus			
September			
Oktober	683.370.800	12.300.674	1,8%
November			
Desember			
<b>TOTAL</b>	<b>683.370.800</b>	<b>12.300.674</b>	

Sumber : Data diolah

Hasil rekapan dari masing-masing SPT Masa PPh 23, PPh 4 ayat (2) dan PPh 15, jika dijumlahkan terkait besaran Penghasilan Bruto nya, ialah :

$$= \text{Rp}22.727.191.284 + \text{Rp}1.139.707.616 + \text{Rp}683.370.800$$

$$= \text{Rp}24.550.269.700$$

Jumlah tersebut jika diekualisasikan dengan jumlah biaya sewa yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Badan, maka :

$$\text{Jumlah biaya sewa dalam SPT Tahunan} = \text{Rp}24.550.269.700$$

$$\text{Jumlah biaya sewa dalam SPT Masa} = \underline{\underline{\text{Rp}24.550.269.700}}$$

$$\text{Selisih} = \text{Rp}0$$

Selisih ekualisasi menunjukkan bahwa pajak yang telah dilaporkan dalam SPT Masa dan SPT Tahunan sama dan tidak terdapat selisih. Tetapi jika dibandingkan dengan hasil penarikan sistem yang dilakukan pihak pajak, yaitu :

$$\text{Jumlah biaya sewa dalam SPT Masa} = \text{Rp}24.550.269.700$$

$$\text{Jumlah terlapor dalam sistem} = \underline{\underline{\text{Rp}24.274.323.593}}$$

$$\text{Selisih} = \text{Rp}275.946.107$$

Selisih ekualisasi tersebut menunjukkan bahwa perusahaan perlu melakukan penelusuran data lebih lanjut, karena perusahaan diduga tidak melaporkan senilai Rp275.946.107 dalam SPT Masa Perusahaan.

c. Berdasarkan ekualisasi DPP SPT Tahunan atas penghasilan Jasa Pelaksanaan Konstruksi dengan Bukti potong Lawan – Jasa Konstruksi terdapat indikasi Penghasilan yang dikenakan PPh Final yang belum dilakukan pemotongan PPh, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 4.7**  
**Hasil Ekualisasi Perpajakan DPP Jasa Pelaksanaan Konstruksi**

DPP cfm SPT Tahunan PPh 1771 Lampiran IV	Rp344.726.088.971
Pelaksanaan Konstruksi	Rp344.726.088.971
DPP Bukti Potong cfm lawan transaksi	Rp291.233.551.392
DPP Bukti Potong lawan transaksi	Rp291.233.551.392
Selisih DPP	Rp53.492.537.579

Sumber : SP2DK PT X Konstruksi, Data diolah





DPP cfm yang telampir dalam SPT Tahunan dapat ditelusuri rinciannya sebagai berikut :

**Tabel 4.8**  
**Rincian Atas Pengakuan DPP Pelaksanaan Jasa Konstruksi**

Penjualan Bersih		
Akun ini terdiri dari :		
Pihak Berelasi		
PT Indonesia Power - EPC Suralaya	Rp163.847.237.855	
PT X Persero, Tbk	Rp52.929.877.638	
PT Pembangunan Perumahan	Rp31.097.329.020	
PT Rekadaya ElektriKa	Rp4.083.345.702	
PT Patra Badak Arun Solusi - Mundu	Rp4.067.200.896	
PT X Bitumen	Rp660.037.167	
<b>Sub Jumlah</b>		<b>Rp256.685.028.278</b>
Pihak Ketiga		
PT Alstom Indonesia	Rp26.693.556.082	
PT Rayon Utama Makmur	Rp25.679.228.817	
PT Inti Karya Persada Teknik	Rp25.658.982.706	
PT Sankyu Indonesia Internasional	Rp4.790.818.520	
PT Indo Karya Bangun Bersama	Rp4.093.645.156	
PT South Pacific Viscose	Rp910.610.000	
PT Wartsila Indonesia	Rp250.219.412	
<b>Sub Jumlah</b>		<b>Rp88.077.060.693</b>
<b>Jumlah</b>		<b>Rp344.762.088.971</b>

Sumber : Catatan Laporan Keuangan PT X Konstruksi, data diolah

Jika dilakukan ekualisasi atas DPP cfm yang dilaporkan dengan rincian penjualan yang telah diakui oleh perusahaan dalam Catatan Laporan Keuangan terkait penjualan, yaitu :

DPP cfm dalam SPT Tahunan	=	Rp344.762.088.971
Rincian atas pengakuan DPP penjualan	=	<u>Rp344.762.088.971</u>
Selisih	=	Rp0

Dan apabila dilakukan ekualisasi antara hasil ekualisasi perpajakan dalam SP2DK yaitu sebagai DPP bukti potong lawan transaksi dengan rincian atas penjualan perusahaan yang telah diakui tersebut, maka:

DPP bukti potong lawan transaksi	=	Rp291.233.551.392
Rincian atas pengakuan DPP penjualan	=	<u>Rp344.762.088.971</u>
Selisih	=	Rp53.492.537.579

Atas selisih tersebut pihak pajak menyatakan bahwa perusahaan diduga belum melakukan pemotongan PPh final atas jasa konstruksi tersebut.

d. berdasarkan data ditel Faktur Pajak Masukan, terdapat indikasi adanya PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) yang belum/kurang dipotong, berikut datanya :

1. Urut-urutan mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



**Tabel 4.9**  
**Ekualisasi Perpajakan Faktur Pajak Masukan**

Data Faktur Masukan	Rp5.204.596.711
DPP PPh Pasal 23 Belum/Kurang Potong	Rp5.204.596.711

Sumber : SP2DK PT X Konstruksi, Data diolah

Data faktur masukan tersebut yang telah ditarik dari sistem oleh pihak perpajakan dinyatakan belum dilakukannya pemotongan oleh pihak perusahaan, sehingga perusahaan diminta untuk penjelasan terkait PPh 23 dan PPh 4 ayat (2) yang belum dilakukan pemotongan. Peneliti menelusuri atas jumlah DPP yang dicantumkan dalam tabel 4.9 tersebut, berikut rinciannya :

**Tabel 4.10**  
**Rincian Atas Faktur Pajak Masukan**

No	NAMA SUPPLIER	JENIS JASA	DPP Belum Dipotong (Rp)	PPh (Rp)
1	PT KARYA SINAR SURYA	Sewa alat	16.130.000	322.600
2	PERKASA TEKNIK	SPV Purwakarta, Pekerjaan Sipil Proyek Water Line SPV Purwakarta	324.526.257	12.981.050
3	SAHABAT KONSTRUKSI INDONESIA	Instalasi Pipa LPG Storage, Spherical Tank Mundu Indramayu, Perjanjian Subkontrak	782.968.500	31.318.740
4	PT KARYA MASTER MANDIRI INDONESIA	Biaya Sertifikasi Teknisi Listrik	123.000.000	4.920.000
5	INKHA ANUGRAH PRATAMA	untuk Mechanical dan Steel Structure, Invoice 30,34% : Jasa Design dan Konstruksi	1.330.000.200	53.200.008
6	CV LINTAS SARANA TELEKOMUNIKASI	DP 30% atas Pengadaan dan Jasa Pemasangan Panasonic KX-NCP1000	17.100.000	684.000
7	RUMAH SUSUN (PPRS) MENARA MTH	Service Charge	219.212.040	8.768.482
8	STANLEY CIPTA MANDIRI	Operator Mobile Crane 50T Periode 15 Mei 2016-15 Juni 2016 Di Dayung	290.000.000	11.600.000
9	NUSANTARA LOGISTICS	dan 8T, dari Jakarta ke PLTG Belitung, Cy To Door, Pengiriman Alat dan Material	603.720.750	24.148.830
10	PT PEC TECH SERVICES INDONESIA	Rental Crane	17.043.740	681.750
11	MUTIARA JAYA ABADI	MM, Batu Gerinda I - Prix SS 7 x 3, Sepatu Safety Ciklat King KWD806 Uk 7, Kabel	1.075.787.112	43.031.484
12	PT ASTRIKA KARYA PUTRA	Jasa Pekerjaan Mobilisasi (020-TR), Jasa Demobilisasi (015)	87.000.000	3.480.000

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian



13	PT INTI KARYA PERSADA TEKNIK	April-Mei 2016, Backcharge Payment for Fuel used period from Junie - August 2016	143.901.118	5.756.045
14	PT ASTRA GRAPHIA, Tbk	Perengkapannya, MOP A4 Color For DC-V C3375 CP, MOP A4 Color For DC-V C3375	170.201.850	6.808.074
15	PT ASTRA INTERNASIONAL, Tbk	TMO SYN 10W-40SN 1LT, Material/Balancing	4.005.144	160.206
	<b>Jumlah</b>		<b>5.204.596.711</b>	<b>207.861.269</b>

Sumber : Data diolah

### 3.2.2. Mengenai Batasan Masalah 2

- a. Terdapat Faktur Pajak yang seharusnya tidak dikreditkan karena telah dibatalkan oleh Penerbit Faktur Pajak, datanya sebagai berikut :

**Tabel 4.11**  
**Hasil Ekualisasi Perpajakan Faktur Pajak Yang Seharusnya Dibatalkan**

No	NPWP Pembeli	Nama WP Pembeli	Masa/ Tahun Pajak Dikreditkan	NPWP Penjual	Nama WP Penjual	No Faktur	Tanggal Penerbitan	DPP (Rp)	PPN (Rp)
1	01.366.291.1-062.000	PT X Konstruksi	201610	706.051.968-063.000	GBP Advocates and Counselors	01103416-133302771	04-10-2016	37.500.000	3.750.000
2	01.366.291.1-062.000	PT X Konstruksi	201610	314.906.223-429.000	Total Daya	01000116-22878504	26-10-2016	2.780.412.375	278.041.238
3	01.366.291.1-062.000	PT X Konstruksi	201611	02.270.525.5-043.000	Hana Caraka Nusantara Logistik	01003416-21542048	19-11-2016	68.000.000	6.800.000
4	01.366.291.1-062.000	PT X Konstruksi	201612	03.099.968.4-721.000	Teknik Nusantara	01003416-03107062	09-12-2016	68.250.000	6.825.000
5	01.366.291.1-062.000	PT X Konstruksi	201612	03.099.968.4-721.000	Teknik Nusantara	01003416-03107062	09-12-2016	68.250.000	6.825.000
6	01.366.291.1-062.000	PT X Konstruksi	201611	31.490.622.3-429.000	Total Daya	01000116-22878505	10-11-2016	2.780.412.375	278.041.238

Sumber : Data diolah

Pihak pajak menduga bahwa perusahaan telah melakukan kredit pajak atas faktur pajak yang telah dibatalkan oleh pihak pajak, karena adanya kekeliruan dan harus dilakukan pembetulan faktur pajak.

### 3.3. Pembahasan

#### 3.3.1. Pembahasan hasil penelitian terkait PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2),

- a. Pada nyatanya Perusahaan mengakui bahwa nominal yang dilampirkan sebagai Bunga Afiliasi tersebut merupakan Biaya Provisi. Biaya Provisi ini menurut Pak Sugih merupakan biaya yang dibayarkan atas fasilitas pinjaman yang diberikan oleh pihak bank. Terdapat pembebasan pajak terkait bunga provisi tersebut dan dasar hukum atas pembebasan ini ada dalam Surat Direktorat Jenderal Pajak Nomor S-78/PJ.311/1996



Tentang Pembebasan PPh Pasal 23 atas penghasilan yang diperoleh perusahaan anjak piutang. Dinyatakan dalam Nomor 2, yaitu “Sesuai Pasal 23 ayat (4) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, atas penghasilan yang diterima oleh Bank tidak dipotong PPh Pasal 23”, karena biaya provisi merupakan penghasilan yang diterima oleh bank sehingga pihak perusahaan tidak melakukan perhitungan, penyetoran terhadap biaya provisi bank.

- b. Seluruh Nilai Biaya Sewa tersebut terdiri dari Biaya Sewa Bangunan, Sewa Peralatan, Sewa Kendaraan, Sewa Helikopter dan Sewa Pesawat yang kewajiban pemotongannya sudah dipenuhi melalui SPT Masa PPh 23, PPh 4 ayat (2) dan PPh 15. Atas selisih dengan nilai Rp275.946.107,- perusahaan menyatakan bahwa itu merupakan nilai atas SPT Masa PPh Pasal 15 Sewa Pesawat.
- c. Menurut Ka Salsa selisih atas ekuivalensi DPP Pelaksanaan Jasa Konstruksi disebabkan karena adanya beda pengakuan lawan transaksi, hal tersebut karena pendapatan yang diperoleh dalam bidang konstruksi diakui berdasarkan metode persentase penyelesaian. Persentase penyelesaian ini diterapkan berdasarkan kemajuan fisik proyek yang dinyatakan dalam bentuk Berita Acara Opname Proyek (BAOP) yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Terhadap pendapatan usaha konstruksi yang telah diterbitkan fakturnya diakui sebagai piutang atas pendapatan sementara yang belum diterbitkan fakturnya diakui sebagai tagihan bruto kepada pemberi kerja. Beban diakui sesuai manfaatnya pasca tahun yang bersangkutan.

Dalam hal ini perusahaan sudah mengakui pendapatan sebesar Rp344.762.088.971, tetapi pada realisasinya lawan transaksi belum mengakui pendapatan tersebut secara penuh, karena adanya retensi atas pelaksanaan jasa konstruksi sebesar Rp53.492.537.579,- retensi ini baru akan diterima ketika enam bulan kemudian atau maksimal satu tahun kemudian. Retensi tersebut menurut Ka Salsa merupakan atas sisa piutang perusahaan kepada pemberi kerja yang akan dilunasi setelah penyelesaian kontrak atau pemenuhan kondisi tertentu.

Dari penelusuran terkait Faktur Pajak Masukan yang diduga belum/kurang potong, terdapat beberapa yang memang belum dilakukan pemotongan atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Final, selain itu ada yang memang merupakan transaksi material sehingga tidak dilakukan pemotongan berdasarkan PPh 23 dan ada yang dikhususkan yaitu PT Inkha Anugrah Pratama dinyatakan dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh Pasal 23, karena memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Selanjutnya terdapat SKB (Surat Keterangan Bebas Pajak) atas PT Astra Graphia, Tbk.

### 3.3.2. Pembahasan hasil penelitian terkait Pajak Pertambahan Nilai,

Pada poin 1 dalam tabel 4.11 menurut Ka Salsa telah dilakukan pembetulan SPT Masa Oktober 2016 atas koreksi Faktur Pajak Masukan GDP Advocates and Counselors, SPT Masa Oktober 2016 terlampir. GBP Advocates and Counselors membatalkan Faktur Pajak tersebut. Selanjutnya Poin 2 Atas Faktur Masukan PT Total Daya sudah dilakukan Pembayaran oleh PT X Konstruksi ke Kas Negara dengan ID Billing milik Total Daya tanggal 19/01/2017. Bagi poin 3, 4, dan 5 pihak perusahaan belum menemukan bukti pendukung atas transaksi tersebut, karena bukti belum diperoleh pihak perusahaan melakukan pembayaran sejumlah nilai pada poin 3, 4 dan 5 yaitu Rp 6.800.000, Rp6.825.000 dan Rp6.825.000 pada tanggal 29 September 2021. Untuk poin 6 atas Faktur Pajak PT Total Daya sudah dilakukan pembayaran oleh PT X Konstruksi ke rekening PT Total Daya pada tanggal 08 September 2017 dikarenakan PT Total Daya telah memenuhi Bukti Setor dan Laporan ke Kas Negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



#### 4. Simpulan dan Saran

Atas SP2DK yang diterbitkan dan telah dijawab, PT X Konstruksi harus membayar pajak yang memang belum dipotong yaitu terkait Faktur Pajak yang belum dilakukan pemotongan atas PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) Final sebesar Rp48.637.340,- dan faktur pajak atas Hana Caraka Nusantara Logistics dan Teknik Nusantara masing-masing sebesar Rp 6.800.000, Rp6.825.000 dan Rp6.825.000. sehingga jika dijumlahkan, yaitu :

Pembayaran atas faktur pajak terkait PPh	= Rp48.637.340,-
Hana Caraka Nusantara Logistics	= Rp6.800.000,-
Teknik Nusantara (Rp6.825.000 x 2)	= Rp13.650.000,-
Jumlah	= Rp69.087.340,-

Jumlah sebesar Rp69.087.340,- yang telah dibayarkan atas kekurangan PT X Konstruksi setelah menjawab SP2DK, nominal tersebut dianggap sebagai selisih kurang bayar PT X Konstruksi atas SPT Tahunan dan SPT Masa yang telah dilaporkan. PT X Konstruksi belum dinyatakan dikenakan denda atas selisih kurang bayar tersebut, pihak pajak akan memproses lebih lanjut dengan menerbitkan STP (Surat Tagihan Pajak).

Dari kesimpulan di atas, peneliti dapat memberikan beberapa saran atas penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan manfaat yang baik. Bagi Perusahaan, dalam upaya mengantisipasi terbitnya SP2DK, perusahaan dapat lebih waspada dan lebih memperhatikan atas kewajiban pajak yang akan dilaporkan maupun telah dilaporkan, untuk mengantisipasi adanya kekeliruan alangkah baiknya perusahaan melakukan ekualisasi internal dalam setiap tahun pajak. Selanjutnya dalam menjawab SP2DK dilakuka degan merinci diikuti berdasarkan ketentuan pajak dalam setiap pos data yang diminta penjelasan, hal tersebut supaya dapat lebih meyakinkan bagi pihak pajak atas jawaban SP2DK. Bagi penelitian selanjutnya, hasil dari penyusunan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan salah satu referensi dan dapat membantu dalam mempertimbangkan supaya lebih memperdalam untuk penelitian selanjutnya.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### References

- Budihartanto, C. (2011). Skripsi : Ekualisasi SPT PPh Badan dan SPT PPN PT X Dalam Tahun Pajak 2009. Universitas Kristen Petra.
- Direktur Jenderal Pajak. (2012). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2012 Tentang Pedoman Penggunaan Metode Dan Teknik Pemeriksaan Untuk Menguji Kepatuhan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan*. Retrieved from DDTC: <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-direktur-jenderal-pajak-per-04pj2012>
- Direktur Jenderal Pajak. (2015). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, Dan Kegiatan Orang Pribadi*. Retrieved from DDTC: <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-direktur-jenderal-pajak-per-32pj2015>
- Direktur Jenderal Pajak. (2015). *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 Tentang Pengawasan Wajib Pajak Dalam Bentuk Permintaan Penjelasan Atas Data Dan/Atau Keterangan, Dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak*. Retrieved from DDTC: <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/surat-edaran-direktur-jenderal-pajak-se-39pj2015>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber, dan menghimbau untuk menyebutkan sumber yang dikutip.  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Direktur Jenderal Pajak. (2021). *Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-18/PJ/2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penghasilan Atas Penyerahan/Penghasilan Sehubungan Dengan Penjualan Pulsa Dan Kartu Perdana*. Retrieved from DDTTC: <https://perpajakan-id.ddtc.co.id/sumber-hukum/peraturan-pusat/peraturan-direktur-jenderal-pajak-per-18pj2021>

Hidayat, M., & Purwana, D. (2018). *Perpajakan Teori & Praktik*. Depok: Rajawali Pers.

Indra Nugraha. (2014). *Analisis Ekualisasi SPT PPN Masa Dengan SPT PPh Badan Pada PT Australian Belt Scaper Indonesia*. Retrieved from Repository UPI: <http://repository.upi.edu/14787/>

Indrawati (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama.

Maulana, Y. (2020). Jurnal : Ekualisasi Laporan Keuangan Dengan Surat Pemberitahuan (SPT) PPN Sebagai Dasar Penyusunan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. *Jurnal Ilmiah Perpajakan*.

Menteri Keuangan. (2008). *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*. Retrieved from Kemenkeu: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/187~PMK.03~2008Per.HTM>

Morisnan. (2019). *Riset Kualitatif*. Jakarta: Kencana.

Nugraha, I. (2014). Skripsi : Analisis Ekualisasi SPT PPN Masa Dengan SPT PPh Badan Pada PT Australian Belt Scaper Indonesia. *Universitas Pendidikan Indonesia*.

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*. Retrieved from Setjen: [https://setjen.pu.go.id/birokeuangan/pdf/Peraturan/PAJAK/PPH\\_PASAL\\_4\\_AYAT\\_2/peraturan\\_pemerintah\\_republik\\_indonesia\\_nomor\\_51\\_tahun\\_2008\\_tentang\\_pajak\\_penghasilan\\_atas\\_penghasilan\\_dari\\_usaha\\_jasa\\_konstruksi.pdf](https://setjen.pu.go.id/birokeuangan/pdf/Peraturan/PAJAK/PPH_PASAL_4_AYAT_2/peraturan_pemerintah_republik_indonesia_nomor_51_tahun_2008_tentang_pajak_penghasilan_atas_penghasilan_dari_usaha_jasa_konstruksi.pdf)

Pohan, C. A. (2017). *Perpajakan Indonesia Teori Dan Kasus*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Purwanto, H. (2010). *Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta: Erlangga.

Rahayu, H. A., & Putranto, H. A. (2020). *Perpajakan*. Bandung: PT Refika Aditama.

Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*. Retrieved from <http://jdih.kemenkeu.go.id/fullText/1983/6TAHUN~1983UU.HTM>

Republik Indonesia. (1983). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Retrieved from Kemenkeu: <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1983/7TAHUN~1983UU.HTM>

Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007*. Retrieved from Pajak: <https://www.pajak.go.id/id/undang-undang-nomor-28-tahun-2007>

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*. Retrieved from <https://jdih.esdm.go.id/peraturan/UU%20No.%2036%20Thn%202008.pdf>

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan*

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber. Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. Penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG. 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



*Tata Cara Perpajakan Menjadi*. Retrieved from DPR:  
[https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU\\_2009\\_16.pdf](https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/UU_2009_16.pdf)

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah*. Retrieved from Kemenkeu:  
[https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU\\_28\\_Tahun\\_2009\\_Ttg\\_PDRD.pdf](https://djpk.kemenkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD.pdf)

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah*. Retrieved from Kemenkeu:  
<https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2009/42tahun2009uu.htm>

Siswanto, E. H., & Tarmidi, D. (2021). *Akuntansi Pajak Teori dan Praktik*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.

Sudaryono (2018). *Metodologi Penelitian*. Depok: Rajawali Pers.

Sugiyono (2007). *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Gramedia.

Sukasih, N. K. (2016). Jurnal : Pemeriksaan Tingkat Keseimbangan (Equalisasi) PPh Pasal 23 Dan Pengakuan Biaya Gaji (PPh 29) Pada Laporan Laba Rugi Pada Rumah Sakit Manuaba Di Denpasar. *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*.

Sukmawan, A., & Winata, A. (2019). Jurnal : Ekualisasi SPT Masa Dengan SPT Tahunan Badan Untuk Mengantisipasi Potensi Pemeriksaan Pajak Pada PT A Kota Solo. *Jurnal Ilmiah Perpajakan*.

Sumarsan, T. (2015). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: PT Indeks.

## LAMPIRAN 1

### WAWANCARA

Wawancara dengan Ka Salsa

Peneliti : Ka, PT X Konstruksi ini termasuk perusahaan jasa konstruksi dalam kualifikasi apa ?

Ka Salsa : Termasuk kualifikasi perusahaan jasa konstruksi dan elektrikal kecil, sedang dan menengah.

Peneliti : Mengapa PT X Konstruksi memperoleh penerbitan SP2DK ?

Ka Salsa : Jadi, dari pihak pajak itu dilakukan ekualisasi terkait perpajakan yang telah dilaporkan dalam SPT Masa dan SPT Tahunan. Dari ekualisasi tersebut pihak pajak memiliki dugaan belum terpenuhinya beberapa pos pajak yang telah dilaporkan, sehingga dalam hal tersebut pihak pajak menerbitkan SP2DK sebagai surat permintaan yang ditujukan kepada perusahaan untuk menjelaskan beberapa pos pajak yang diduga belum terpenuhi pemotongan, penyetoran dan pelaporannya. PT X Konstruksi ini diduga belum memenuhi sepenuhnya terkait kewajiban perpajakannya.

Peneliti : Terus ekualisasi itu apa ya ka ?

Ka Salsa : Ekualisasi itu teknik menyamakan data antara data yang satu dengan data yang lainnya, yang jelas data itu tuh ada hubungannya, kaya misal pos pajak yang di cantumin dalam SPT Tahunan sama tidak dengan nominal per SPT masa kalau dijumlahkan. Nah ekualisasi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Peneliti

Ka Salsa

Peneliti

Ka Salsa

Peneliti

Ka Salsa

Peneliti

Ka Salsa

Peneliti

Ka Salsa

ini ada dua macam yaitu ekualisasi yang dilakukan oleh pihak perpajakan atau kita sebutnya ekualisasi perpajakan sama ekualisasi perusahaan. Ekualisasi perusahaan biasanya ada yang memang rutin melakukannya setiap masa atau setiap tahun pajak, tapi di PT X Konstruksi ini lebih ke rekonsiliasi, kita udah lama tidak melakukan ekualisasi, karena sebenarnya rekonsiliasi ini turunan dari ekualisasi, rekonsiliasi dan ekualisasi seperti satu jenis. Karena kita (PT X Konstruksi) memperoleh penerbitan SP2DK jadi kita menelusuri data dengan melakukan teknik yang sama dengan pihak perpajaka yaitu melakukan ekualisasi, kita membandingkan data-data yang kita miliki dengan data yang menjadi dugaan pihak pajak karena ada kekeliruan atau memang pihak perusahaan belum/kurang melakukan pemotongan.

Kalau dalam melakukan ekualisasi, terus dapat menjawab SP2DK itu, dan ternyata memang ada yang kurang/belum dipotong perusahaan terkait beberapa pos pajak, perusahaan dapet denda tidak ?

kalau dinyatakan memang ada yang belum/kurang bayar secara perpajakannya kita emang ada kurang bayar, kita otomatis langsung bayar dulu, untuk masalah denda pasti ada, cuma kita nunggu proses lebih lanjut, nanti pihak perpajakan bakal nerbitin STP (Surat Tagihan Pajak)

Saya lanjut nanya terkait SP2DK nya ya ka, untuk poin yang pertama itu terkait biaya bunga pinjaman, itu terdapat masalah apa ka ?

Itu pihak pajak salah pengakuan, mereka ngira itu adalah biaya bunga pinjaman afiliasi jadi harusnya dikenain PPh 23 dengan tarif 15%, tapi padahal itu biaya bunga provisi, yang mana kalo bunga provisi itu gak dikenain PPh 23.

Untuk poin 2 ka tentang biaya sewa ?

di poin 2 ini atas biaya sewa yang dilaporin di SPT Tahunan, kan pihak pajak melakukan ekualisasi, mereka narik data dari sistemnya atas PPh 23 dan PPh 4 ayat (2) pas diekualisasi ada selisih ternyata dari sistem mereka kurang, jadi kita dianggap tidak melaporkan yang selisihnya itu. Padahal yang kita cantumin dalam SPT Tahunan bukan hanya terkait PPh 23 dan PPh 4 ayat (2) tapi disitu ada PPh 15 juga terkait sewa pesawat.

Untuk yang poin 3 ka, kenapa bisa ada selisih atas DPP penjualan ?

Jadi kalo yang poin 3 itu, perusahaan udah mengakui pendapatan penjualan sebesar yang tercantum dalam SPT Tahunan, tetapi pada nyatanya, kalo perusahaan konstruksi itu dalam pelaksanaan jasa konstruksi selalu ada retensi, nah yang selisih itu tu retensi yang akan dibayar nanti, jadi kemarin di tahun 2016 itu perusahaan baru menerbitkan faktur pajak sesuai pendapatan yang diterima. Untuk retensi itu perusahaan akan buat faktur nanti setelah progres selesai dan biasanya dia baru cairnya 6 bulan kemudian atau maksimal 1 tahun kemudian semenjak deal pelaksanaan konstruksi.

Untuk poin 4 ka, itu maksudnya beberapa dari Faktur Masukan dianggap belum/kurang potong atas PPh ?

Iya bener, jadi mereka menarik Faktur Masukan dari sistem atas yang kita laporkan, nah terdapat angka yang dicantumin dalam situ, itu mereka menduga belum kita potong. Memang beberapa ada yang belum kita potong, tapi ada juga yang memang transaksi material yaitu pembelian pasir gitu-gitu, sama ada dua yang memang dibebaskan dari pemotongan pajak.





Peneliti : yang terakhir ini ka ? Maksudnya gimana perusahaan melakukan pengkreditan atas Faktur Pajak yang telah dibatalkan ?

Ka Salsa : Jadi kan faktur pajak masukan itu memang dapat dikreditkan, nah perusahaan itu seperti biasa melakukan kredit pajak. tapi ternyata terkait PT Total Daya, faktur yang udah mereka terbitin itu mereka batalin, dan mereka nerbitin lagi yang baru, kita gak dikonfirmasi jadi tetep kita lakuin kredit, dan ternyata pada saat restitusi

Wawancara sedikit dengan Pak Sugi terkait

Peneliti : Pak Sugh, bunga afiliasi itu apa ?

Pak Sugh : Bunga Afiliasi itu seperti bunga pinjaman atas peminjaman yang dilakukan antara perusahaan dengan perusahaan yang terafiliasi, kaya misal PT X Konstruksi memperoleh pinjaman dari PT X Persero, dari pinjaman itu terdapat bunga afiliasi. Bunga afiliasi termasuk bunga pinjaman jadi harus dikenakan PPh 23 dengan tarif pemotongan 15%.

Peneliti : Bedanya sama bunga provisi apa pak sugih ?

Pak Sugh : kalau bunga provisi itu biaya yang dibayarkan atas fasilitas pinjaman yang diberikan oleh pihak bank kaya modelan biaya administrasi gitu, nah kalo bunga ini deberi kebebasan gak ada pemotongan PPh 23.

## LAMPIRAN 2 SPT Masa PPh Pasal 23

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
RAGAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK WAJIB PAJAK

SURAT PERMINTAAN (SPT) MASA  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26  
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26

1. NPWP  
2. Nama WP  
3. Alamat

1. PPh Pasal 23 yang tidak dipotong

Jenis Penghasilan	MAP/KIS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dividen	41121001		
2. Bunga (*)	41121002		
3. Royalti	41121003		
4. Hasil dari pengalihan	41121004		
5. Sewa dan Penghasilan lain sebagainya dengan program kerja (**)	41121005	2.224.134.422	49.985.911
6. Jasa Tulis	41121006		
7. Jasa Managemen	41121007		
8. Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lain Sebagi PPh 23/PAK 23/2008	41121008		
9. Jasa Lain ***	41121009		
10. Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lain Sebagi PPh 23/PAK 23/2008	41121010		
11. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121011	6.192.000	123.840
12. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121012		
13. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121013		
14. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121014		
Jumlah		2.230.326.422	49.212.361

Tetapan: Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Tiga Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah

1. PPh Pasal 23 yang tidak dipotong

Jenis Penghasilan	MAP/KIS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dividen	41121001		
2. Bunga (*)	41121002		
3. Royalti	41121003		
4. Hasil dari pengalihan	41121004		
5. Sewa dan Penghasilan lain sebagainya dengan program kerja (**)	41121005		
6. Jasa Tulis	41121006		
7. Jasa Managemen	41121007		
8. Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lain Sebagi PPh 23/PAK 23/2008	41121008		
9. Jasa Lain ***	41121009		
10. Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lain Sebagi PPh 23/PAK 23/2008	41121010		
11. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121011		
12. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121012		
13. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121013		
14. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121014		
Jumlah		0	0

Tetapan: Tidak Ada

1. PPh Pasal 26 yang tidak dipotong

Jenis Penghasilan	MAP/KIS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dividen	41121001		
2. Bunga (*)	41121002		
3. Royalti	41121003		
4. Hasil dari pengalihan	41121004		
5. Sewa dan Penghasilan lain sebagainya dengan program kerja (**)	41121005		
6. Jasa Tulis	41121006		
7. Jasa Managemen	41121007		
8. Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lain Sebagi PPh 23/PAK 23/2008	41121008		
9. Jasa Lain ***	41121009		
10. Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lain Sebagi PPh 23/PAK 23/2008	41121010		
11. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121011		
12. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121012		
13. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121013		
14. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121014		
Jumlah		0	0

Tetapan: Tidak Ada

1. PPh Pasal 26 yang tidak dipotong

Jenis Penghasilan	MAP/KIS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dividen	41121001		
2. Bunga (*)	41121002		
3. Royalti	41121003		
4. Hasil dari pengalihan	41121004		
5. Sewa dan Penghasilan lain sebagainya dengan program kerja (**)	41121005		
6. Jasa Tulis	41121006		
7. Jasa Managemen	41121007		
8. Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lain Sebagi PPh 23/PAK 23/2008	41121008		
9. Jasa Lain ***	41121009		
10. Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lain Sebagi PPh 23/PAK 23/2008	41121010		
11. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121011		
12. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121012		
13. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121013		
14. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121014		
Jumlah		0	0

Tetapan: Tidak Ada

DEPARTEMEN KEUANGAN RI  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
RAGAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK WAJIB PAJAK

SURAT PERMINTAAN (SPT) MASA  
PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26  
Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26

1. NPWP  
2. Nama WP  
3. Alamat

1. PPh Pasal 23 yang tidak dipotong

Jenis Penghasilan	MAP/KIS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dividen	41121001		
2. Bunga (*)	41121002		
3. Royalti	41121003		
4. Hasil dari pengalihan	41121004		
5. Sewa dan Penghasilan lain sebagainya dengan program kerja (**)	41121005	1.426.960.262	98.192.796
6. Jasa Tulis	41121006		
7. Jasa Managemen	41121007		
8. Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lain Sebagi PPh 23/PAK 23/2008	41121008		
9. Jasa Lain ***	41121009		
10. Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lain Sebagi PPh 23/PAK 23/2008	41121010		
11. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121011	61.051.200	2.442.214
12. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121012	84.200.000	1.263.000
13. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121013	67.740.000	1.016.100
14. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121014		
Jumlah		1.539.951.462	98.663.100

Tetapan: Tiga Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Sembilan Puluh Dua Rupiah

1. PPh Pasal 23 yang tidak dipotong

Jenis Penghasilan	MAP/KIS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dividen	41121001		
2. Bunga (*)	41121002		
3. Royalti	41121003		
4. Hasil dari pengalihan	41121004		
5. Sewa dan Penghasilan lain sebagainya dengan program kerja (**)	41121005		
6. Jasa Tulis	41121006		
7. Jasa Managemen	41121007		
8. Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lain Sebagi PPh 23/PAK 23/2008	41121008		
9. Jasa Lain ***	41121009		
10. Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lain Sebagi PPh 23/PAK 23/2008	41121010		
11. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121011		
12. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121012		
13. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121013		
14. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121014		
Jumlah		0	0

Tetapan: Tidak Ada

1. PPh Pasal 26 yang tidak dipotong

Jenis Penghasilan	MAP/KIS	Jumlah Penghasilan Bruto (Rp)	PPh yang dipotong (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Dividen	41121001		
2. Bunga (*)	41121002		
3. Royalti	41121003		
4. Hasil dari pengalihan	41121004		
5. Sewa dan Penghasilan lain sebagainya dengan program kerja (**)	41121005		
6. Jasa Tulis	41121006		
7. Jasa Managemen	41121007		
8. Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lain Sebagi PPh 23/PAK 23/2008	41121008		
9. Jasa Lain ***	41121009		
10. Jasa Konsultansi dan/atau Jasa Lain Sebagi PPh 23/PAK 23/2008	41121010		
11. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121011		
12. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121012		
13. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121013		
14. Jasa Penjualan Barang Kebutuhan Pokok (JKP) ***	41121014		
Jumlah		0	0

Tetapan: Tidak Ada

1. Dilarang menyalin atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Peneliti : Pak Sugh

Peneliti : Pak Sugh

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

RAGAN B. PERNYATAAN TANPA TANGKALAN  
Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa data yang saya sampaikan adalah benar-benar dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan saya bertanggung jawab atas kebenaran data tersebut.

1. Nama  
2. Alamat  
3. Tanggal

1. SPT Masa Diisi  
2. Langgung dan WP  
3. Mekanis PPh

1. SPT Masa Diisi  
2. Langgung dan WP  
3. Mekanis PPh









**SURAT PEMBERITAHAAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Penghasilan/Pengeluaran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR IDENTITAS PEMOTONG PAJAK WAJIB PAJAK

1. NPWP	2. Nama WP	3. Alamat
01100000000000000000		

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

Urutan	KARAKTER	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPH yang Diwajibkan/Disamping/Di luar Sifat (Rp)
1	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
2	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
3	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
4	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
5	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
6	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
7	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
8	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
9	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
10	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
11	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
12	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
13	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
14	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
15	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
16	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
17	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
18	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
19	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
20	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
Jumlah		17.038.559.721		565.148.732

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1.  Surat Selbaran Pajak 2 lembar

2.  Daftar Bukti Pemotongan/Pengurangan PPH Final Pasal 4 Ayat (2) 2 lembar

3.  Bukti Pemotongan/Pengurangan PPH Final Pasal 4 Ayat (2) 2 lembar

4.  Surat Kuasa Khusus

**BAGIAN D. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Penghasilan/Pengeluaran yang dilaporkan adalah benar-benar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, saya menyetujui bahwa apa yang telah saya beritahikan di atas benar-benar merupakan penghasilan/pengeluaran yang sebenarnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ditandatangani dan ditandatangani oleh:

\_\_\_\_\_  
Nama: [Nama Wajib Pajak]  
NPWP: [NPWP]  
Tanda Tangan: [Tanda Tangan]  
Tanggal: [Tanggal]

**SURAT PEMBERITAHAAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Penghasilan/Pengeluaran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR IDENTITAS PEMOTONG PAJAK WAJIB PAJAK

1. NPWP	2. Nama WP	3. Alamat
01100000000000000000		

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

Urutan	KARAKTER	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPH yang Diwajibkan/Disamping/Di luar Sifat (Rp)
1	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
2	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
3	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
4	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
5	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
6	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
7	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
8	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
9	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
10	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
11	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
12	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
13	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
14	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
15	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
16	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
17	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
18	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
19	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
20	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
Jumlah		1.952.007.000		72.054.171

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1.  Surat Selbaran Pajak 2 lembar

2.  Daftar Bukti Pemotongan/Pengurangan PPH Final Pasal 4 Ayat (2) 2 lembar

3.  Bukti Pemotongan/Pengurangan PPH Final Pasal 4 Ayat (2) 2 lembar

4.  Surat Kuasa Khusus

**BAGIAN D. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Penghasilan/Pengeluaran yang dilaporkan adalah benar-benar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, saya menyetujui bahwa apa yang telah saya beritahikan di atas benar-benar merupakan penghasilan/pengeluaran yang sebenarnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ditandatangani dan ditandatangani oleh:

\_\_\_\_\_  
Nama: [Nama Wajib Pajak]  
NPWP: [NPWP]  
Tanda Tangan: [Tanda Tangan]  
Tanggal: [Tanggal]

**SURAT PEMBERITAHAAN (SPT) MASA PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)**

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Penghasilan/Pengeluaran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)

DEPARTEMEN KEUANGAN R.I. DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

DAFTAR IDENTITAS PEMOTONG PAJAK WAJIB PAJAK

1. NPWP	2. Nama WP	3. Alamat
01100000000000000000		

**BAGIAN B. OBJEK PAJAK**

Urutan	KARAKTER	Nilai Objek Pajak (Rp)	Tarif (%)	PPH yang Diwajibkan/Disamping/Di luar Sifat (Rp)
1	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
2	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
3	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
4	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
5	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
6	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
7	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
8	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
9	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
10	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
11	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
12	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
13	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
14	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
15	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
16	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
17	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
18	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
19	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
20	Bunga Deposito/Tabungan, tabung Simpanan, Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan, Tabung Deposito Tabung, Tabung Simpanan	0	0	0
Jumlah		21.158.007.000		691.603.600

**BAGIAN C. LAMPIRAN**

1.  Surat Selbaran Pajak 2 lembar

2.  Daftar Bukti Pemotongan/Pengurangan PPH Final Pasal 4 Ayat (2) 2 lembar

3.  Bukti Pemotongan/Pengurangan PPH Final Pasal 4 Ayat (2) 2 lembar

4.  Surat Kuasa Khusus

**BAGIAN D. PENYATAAN DAN TANDA TANGAN**

Penghasilan/Pengeluaran yang dilaporkan adalah benar-benar sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku, saya menyetujui bahwa apa yang telah saya beritahikan di atas benar-benar merupakan penghasilan/pengeluaran yang sebenarnya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Ditandatangani dan ditandatangani oleh:

\_\_\_\_\_  
Nama: [Nama Wajib Pajak]  
NPWP: [NPWP]  
Tanda Tangan: [Tanda Tangan]  
Tanggal: [Tanggal]

## LAMPIRAN 4 SP2DK PT X Konstruksi

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA TIMUR**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK MADYA JAKARTA TIMUR**  
Jl. TB. SIMPATI, SATELIT KEMAS, RT. 001/001, KEMAS, JAKARTA BARAT 10110  
TSPUN: 01 5247313, SATELIT KEMAS: 01 5247313, SATELIT KEMAS: 01 5247313  
LAYANAN INFO: 1500 800 123, LAYANAN INFO: 1500 800 123, LAYANAN INFO: 1500 800 123

Nomor: SP2DK/02/WP.120KP.072021 / 1 September 2021  
Sifat: Segera  
Lampiran: 2  
Perihal: Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan terkait SPT Tahunan PPH Badan 2016

Yth. Pimpinan NPWP 013662911042.000 RW 011 JATIWARA JAKARTA TIMUR DKI JAKARTA -

Kami mengucapkan terima kasih atas pemenuhan kewajiban perpajakan yang telah Saudara lakukan selama ini. Dalam rangka ketertiban pemenuhan kewajiban perpajakan, perlu kami ingatkan beberapa hal sebagai berikut:

- Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009 menyatakan bahwa Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani.
- Sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009, Saudara diperkenankan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan apabila Surat Pemberitahuan yang telah saudara sampaikan belum memenuhi ketentuan peraturan perpajakan yang bersangkutan dengan pemenuhan kewajiban pajak.
- Wajib Pajak dengan dengan segera tidak menyampaikan dan/atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, dapat dikenakan sanksi sesuai Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- Berdasarkan data administrasi dan penelitian atas kewajiban pembayaran dan pelaporan SPT Tahunan Saudara Tahun Pajak 2016, diketahui dan disampaikan hal-hal sebagai berikut:
  - Terdapat selisih nilai Biaya Bunga Pinjaman yang dilaporkan pada SPT Tahunan PPH Badan dengan total nilai DPP/Objek Pajak terutang yang dilaporkan pada SPT Masa PPh Pasal 23/dan/atau PPh Pasal 4 ayat (2), dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tahun Pajak	Jumlah Nilai Biaya Bunga Pinjaman Cfm SPT Tahunan PPH Pasal 23	Nilai Objek Pajak Terkait Bunga Cfm SPT Masa PPh Pasal 23	Nilai Objek Pajak Terkait Bunga Cfm SPT Masa PPh Pasal 26	Jumlah Nilai Objek Pajak Terkait Bunga	Selisih
1	2016	1.429.186.667	-	-	-	1.429.186.667

NP-KP-DPAP-0705

b. Terdapat selisih biaya sewa yang dilaporkan oleh Wajib Pajak badan pada SPT Tahunan PPH lampiran II dengan akumulasi nilai objek PPh Pasal 23 dan 26 dan PPh Final Pasal 4 (2) yang dilaporkan dalam SPT masa, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tahun Pajak	Jumlah Biaya Pajak Sewa Cfm SPT Tahunan II	Nilai Objek Pajak Cfm SPT Masa PPh Pasal 23	Nilai Objek Pajak Cfm SPT Masa PPh Pasal 26	Nilai Objek Pajak Cfm SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2)	Total	Selisih
1	2016	24.500.269.700	23.134.615.977	20	1.159.707.616	24.274.323.593	275.946.107

c. Terdapat indikasi adanya laba yang kurang dilaporkan berdasarkan Laba ditahan tahun berikutnya, dengan perincian sebagai berikut:

No.	Tahun Pajak	Labo Ditahan Laba Tahun Berjalan	Labo Ditahan Laba Tahun Berjalan	Labo Ditahan Laba Tahun Berjalan	Labo Ditahan + Labo Tahun Berjalan	Selisih
1	2016	31.346.354.936	13.032.930.991	54.550.123.137	44.379.285.927	10.170.837.210

d. Terdapat Faktur Pajak yang seharusnya tidak dikredikan karena telah dibatalkan oleh Penerbit Faktur Pajak, dengan Perincian Sebagai berikut:

No.	NPWP Pembeli	Nama Wajib Pajak Pembeli	Masa/Tgl. Pajak Dibayar	NPWP Penjual	No. Faktur Pajak	NPWP Pembeli	No. Faktur Pajak	DPP	DPP
1.	01.366.291-1	PT WUJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI	201610	70.805.196-8	063.000	01103	2016-10	37.600.000	3.750.000
2.	01.366.291-1	PT WUJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI	201610	31.460.622-3	429.000	01000	2016-10	2.780.412,3	278.041,2
3.	01.366.291-1	PT WUJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI	201611	02.270.955-4	043.000	01103	2016-11	69.900.000	9.800.000
4.	01.366.291-1	PT WUJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI	201612	03.000.968-4	721.000	01103	2016-12	68.250.000	6.825.000
5.	01.366.291-1	PT WUJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI	201612	03.098.868-4	721.000	01103	2016-12	68.250.000	6.825.000
6.	01.366.291-1	PT WUJAYA KARYA REKAYASA KONSTRUKSI	201611	31.490.822-3	429.000	01000	2016-11	2.780.412,3	278.041,2

NP-KP-DPAP-0705

e. Berdasarkan evaluasi DPP SPT Tahunan atas Penghasilan Jasa Pelaksana Konstruksi dengan Bukti Potong Lawan -Jasa Konstruksi terdapat indikasi Penghasilan yang dikenakan PPH Final yang belum dilakukan pemotongan PPH, dengan perincian sebagai berikut:

No.	SP2DK/02/WP.120KP.072021	Sifat	Lampiran	Perihal	DPP	DPP
a1	DPP cfm SPT Tahunan PPH 1771, Lampiran IV	-	-	-	344.726.088.971	-
a2	Penghasilan Penghasilan Hak Atas Tanah/Bangunan	-	-	-	-	-
a3	Pelaksanaan Konstruksi	-	-	-	344.726.088.971	-
a4	Perencanaan Konstruksi	-	-	-	-	-
a5	Perencanaan Konstruksi	-	-	-	-	-
a6	Perwakilan Dagang Asing	-	-	-	-	-
a7	Pelayanan Perencanaan Asing	-	-	-	-	-
a8	Pelayanan Dalam Negeri	-	-	-	-	-
a9	Perwakilan Aktiva Tetap	-	-	-	-	-
B	DPP cfm Bukti Potong Lawan Transaksi (Pasal 4 Ayat 2 dan Pasal 15)	-	-	-	291.233.551.392	-
b1	DPP Bukti Potong Cfm SPT Masa PPh Pasal 15 Lawan	-	-	-	-	-
b2	DPP Bukti Potong Cfm SPT Masa PPh Pasal 42 Lawan	-	-	-	291.233.551.392	-
b3a	DPP Bukti Potong Lawan - Persewaan Tanah dan/atau Bangunan	-	-	-	-	-
b3b	DPP Bukti Potong Lawan - Jasa Konstruksi	-	-	-	291.233.551.392	-
b4	DPP cfm Pembayaran PPH Final Yang Dibayar Sendiri	-	-	-	-	-
c1	DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Penghasilan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan	-	-	-	-	-
c2	DPP PPh Final Pasal 15 atas Penghasilan Persewaan Dagang Luar Negeri	-	-	-	-	-
c3	DPP PPh Final Pasal 19 atas Realisasi Aktiva Tetap	-	-	-	-	-
c4	DPP PPh Final Pasal 4 ayat (2) atas Persewaan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (sektor sendiri)	-	-	-	63.492.537.579	-
d	Selisih (a - b + c)	-	-	-	-	53.492.537.579

f. Berdasarkan data deli FP Pajak Badan, terdapat indikasi adanya PPh Pasal 23 yang belum/kurang dilaporkan sebagai berikut:

No.	DPP PPh Pasal 23 Belum/Kurang Potong	DPP
a	DPP PPh Pasal 23 Belum/Kurang Potong	5.204.596.711

g. Diminta untuk memberikan penjelasan terkait perbedaan realisasi Pembayaran Hutang Pajak dengan Hutang Pajak berdasarkan transkrip Laporan Keuangan

No.	Nomor Faktur Pajak	DPP	DPP
a	Nilai Hutang Pajak Cfm Transkrip	7.248.699.580	-
b	Nilai Pembayaran Pajak Di Tahun berikutnya	6.996.966.116	-
c	Selisih	251.733.464	-





LAMPIRAN 6

Laporan Perusahaan

LAPORAN POSISI KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
As of December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	31 Des/ Dec 31 2016	2015	
			<b>ASSETS</b>
			<b>CURRENT ASSETS</b>
Aset Lancar			Cash and Cash Equivalent
Kas dan Setor Kas	2e,3	49.603.313.594	20.845.888.724
Pinjaman Usaha	2f,2g,4	-	Accounts Receivables
Pinjaman Usaha			(Net of accumulated provision for doubtful receivables of Rp6.227.708.706 and Rp2.866.605.638 in December 31, 2016 and 2015)
Pinjaman Usaha			Third Parties
Pinjaman Usaha			Related Parties
Pinjaman Usaha			Retention Parties
Pinjaman Usaha			Due From Customer
Pinjaman Usaha			Inventory
Pinjaman Usaha			Advances
Pinjaman Usaha			Prepaid Taxes
Pinjaman Usaha			Work in the Implementation
Pinjaman Usaha			Other Receivables
<b>Jumlah Aset Lancar</b>		<b>273.223.084.457</b>	<b>179.205.414.851</b>
			<b>NON CURRENT ASSETS</b>
Aset Tidak Lancar			Fixed Assets
Aset Tidak Lancar			(Net of accumulated depreciation amount of Rp6.650.674.184 and Rp3.311.152.804 in December 31, 2016 and 2015)
Aset Tidak Lancar			Investment Joint Venture
Aset Tidak Lancar			Other Assets
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>		<b>295.616.137.856</b>	<b>205.016.839.775</b>
			<b>TOTAL ASSETS</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. See the accompanying notes to the financial statements which are an integral part of the financial statements as a whole.

LAPORAN POSISI KEUANGAN  
Tanggal 31 Desember 2016 dan 2015  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
As of December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	31 Des/ Dec 31 2016	2015	
			<b>LIABILITIES DAN EKUITAS</b>
			<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>
Pinjaman Jangka Pendek	14	10.000.000.000	15.000.000.000
Utang Usaha	15	29.970.345.306	20.387.290.945
Utang Lain-Lain	16	437.294.308	144.648.992
Utang Pajak	2r,17b	7.248.699.580	4.458.314.136
Biaya yang Masih Harus Dibayar	18	78.465.710.020	21.956.808.239
Pendapatan Diterima Dimuka	2o,19	36.780.854.585	21.689.103.556
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>162.902.903.799</b>	<b>83.636.165.868</b>
			<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>
Kewajiban Imbalan Kerja	2p,20	13.296.894.375	8.115.577.319
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>13.296.894.375</b>	<b>8.115.577.319</b>
<b>Jumlah Liabilitas</b>		<b>176.199.798.174</b>	<b>91.751.743.187</b>
			<b>EKUITAS</b>
Modal Saham			Capital Stock
Modal Dasar 160.000 saham, Nilai Nominal Rp1.000.000 modal ditempatkan dan disetor 42.896 saham.	21	42.896.000.000	42.896.000.000
Tambahan Modal Disetor		21.378.000.000	21.378.000.000
Komponen Ekuitas Lainnya		10.763.053.755	13.893.045.103
Saldo Laba			Additional Paid-in Capital
Ditentukan Penggunaannya		6.677.308.040	7.927.873.557
Belum Ditentukan Penggunaannya		37.701.977.887	27.170.177.928
<b>Jumlah Ekuitas</b>		<b>119.416.339.682</b>	<b>113.265.096.588</b>
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas</b>		<b>295.616.137.856</b>	<b>205.016.839.775</b>

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. See the accompanying notes to the financial statements which are an integral part of the financial statements as a whole.

LAPORAN LABA RUGI DAN PENDAPATAN KOMPREHENSIF  
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir 31 Desember 2016 dan 2015  
(Dinyatakan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

THE STATEMENT OF COMPREHENSIVE INCOME  
For The Years Ended December 31, 2016 and 2015  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

Catatan/ Notes	31 Des/ Dec 31 2016	2015	
			<b>Sales</b>
Penjualan	2q,22	344.782.068.971	222.254.554.869
<b>Beban Pokok Penjualan</b>	2q,23	<b>307.008.354.114</b>	<b>187.787.536.122</b>
<b>Laba Kotor</b>		<b>37.773.714.857</b>	<b>34.467.018.747</b>
Penjualan (Gaji) pada Ventura Bersama	24	3.582.125.129	(1.692.118.437)
<b>Jumlah Laba Kotor</b>		<b>41.355.862.986</b>	<b>32.774.900.309</b>
<b>Beban Usaha</b>			
Beban Penjualan	2q,25	436.936.218	405.708.614
Beban Umum dan Administrasi	2q,25	12.020.280.165	10.157.447.675
<b>Jumlah Beban Usaha</b>		<b>12.457.216.383</b>	<b>10.563.156.289</b>
<b>Labanya Usaha</b>		<b>28.878.646.603</b>	<b>22.211.744.021</b>
<b>Pendapatan (Beban) Lain-lain</b>			
Pendapatan (Beban) Lain-lain	26	1.224.430.992	1.632.876.290
Labanya (Rugi) Selisih Kurs		(822.845.345)	(1.033.343.920)
Pajak Penghasilan Final		(10.351.056.328)	(8.895.636.256)
Beban Lain-lain		(1.429.166.667)	(1.116.720.325)
Beban Lain-lain		(4.467.078.264)	(203.264.643)
Pendapatan Lainnya - Bersih		(15.845.715.612)	(9.706.088.854)
<b>Labanya Sebelum Pajak Penghasilan</b>		<b>13.032.930.991</b>	<b>12.505.655.167</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>	2r		
<b>Jumlah Pajak Penghasilan</b>			
<b>Labanya Bersih</b>		<b>13.032.930.991</b>	<b>12.505.655.167</b>
<b>Penghasilan Komprehensif Lain Setelah Pajak</b>			
Penghasilan yang tidak akan direklasifikasi ke Laba Rugi			
Kesultanan (Kerugian) Aktuarial Atas Program Jambal Kerja Pasti		(3.129.991.348)	(752.521.442)
<b>Penghasilan yang akan Direklasifikasi ke Laba Rugi</b>			
<b>Jumlah Penghasilan Komprehensif Periode Berjalan</b>		<b>9.902.939.643</b>	<b>11.753.133.725</b>
<b>Labanya Bersih per Saham</b>	2i	303.826	291.534

Lihat catatan atas laporan keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan. See the accompanying notes to the financial statements which are an integral part of the financial statements as a whole.

22. PENJUALAN BERSIH

Akun ini terdiri dari :

	2016	2015
<b>Pihak Berelasi</b>		
PT Indonesia Power - EPC Surabaya	163.847.237.855	-
	52.929.877.638	514.341.045
PT Pembangunan Perumahan	31.097.329.020	19.869.490.361
PT Rekadaya Elektrika	4.083.345.702	27.494.602.415
PT Patra Badak Arun Solusi - Mundu	4.067.200.896	10.669.214.037
	660.037.167	-
<b>Sub Jumlah</b>	<b>256.685.028.278</b>	<b>58.547.647.858</b>
<b>Pihak Ketiga</b>		
PT Alstom Indonesia	26.693.556.082	-
PT Rayon Utama Makmur	25.679.228.817	19.510.973.630
PT Inli Karya Persada Teknik	25.958.982.706	3.157.629.539
PT Sankyu Indonesia International	4.790.818.520	7.112.964.000
PT Indo Karya Bangun Bersama	4.093.645.156	3.857.744.146
PT South Pacific Viscose	910.610.000	3.212.350.000
PT Wartasila Indonesia	250.219.412	103.177.813.261
PT IOT EPC Indonesia	-	23.187.515.522
PT Sakti Mas Mulia	-	331.679.903
PT Krakatau Posco	-	158.237.010
<b>Sub Jumlah</b>	<b>88.077.060.693</b>	<b>163.706.907.011</b>
<b>Jumlah</b>	<b>344.762.088.971</b>	<b>222.254.554.869</b>

22. NET SALES

This account consists of :

	2016	2015	Related Parties
<b>Pihak Berelasi</b>			
PT Indonesia Power - EPC Surabaya	163.847.237.855	-	PT Indonesia Power - EPC Surabaya
	52.929.877.638	514.341.045	
PT Pembangunan Perumahan	31.097.329.020	19.869.490.361	PT Pembangunan Perumahan
PT Rekadaya Elektrika	4.083.345.702	27.494.602.415	PT Rekadaya Elektrika
PT Patra Badak Arun Solusi - Mundu	4.067.200.896	10.669.214.037	PT Patra Badak Arun Solusi - Mundu
	660.037.167	-	
<b>Sub Total</b>	<b>256.685.028.278</b>	<b>58.547.647.858</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Pihak Ketiga</b>			<b>Third Parties</b>
PT Alstom Indonesia	26.693.556.082	-	PT Alstom Indonesia
PT Rayon Utama Makmur	25.679.228.817	19.510.973.630	PT Rayon Utama Makmur
PT Inli Karya Persada Teknik	25.958.982.706	3.157.629.539	PT Inli Karya Persada Teknik
PT Sankyu Indonesia International	4.790.818.520	7.112.964.000	PT Sankyu Indonesia International
PT Indo Karya Bangun Bersama	4.093.645.156	3.857.744.146	PT Indo Karya Bangun Bersama
PT South Pacific Viscose	910.610.000	3.212.350.000	PT South Pacific Viscose
PT Wartasila Indonesia	250.219.412	103.177.813.261	PT Wartasila Indonesia
PT IOT EPC Indonesia	-	23.187.515.522	PT IOT EPC Indonesia
PT Sakti Mas Mulia	-	331.679.903	PT Sakti Mas Mulia
PT Krakatau Posco	-	158.237.010	PT Krakatau Posco
<b>Sub Jumlah</b>	<b>88.077.060.693</b>	<b>163.706.907.011</b>	<b>Sub Total</b>
<b>Jumlah</b>	<b>344.762.088.971</b>	<b>222.254.554.869</b>	<b>Total</b>

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Hak cipta milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie) dan Universitas Kwik Kian Gie. Tidak diperbolehkan untuk menyalin, mendistribusikan, atau menggunakan kembali isi dari dokumen ini tanpa izin tertulis dari Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie.



LAMPIRAN 7

Faktur Masukan dalam SPT Masa PPN dan Pembedan

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI								FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diangkitkan)		
MASA : 10 // 10 - 2018 (mm-yy-yyyy)			Pembetulan Ke : 0 ( nol )							
No	Nama Pengal BKP/ BKP Tidak Berwujud	NWPP	Kode dan Nomor Seri	Angka Pajak	DPP (Rp/ribu)	PPN (Rp/ribu)	PPnBM (Rp/ribu)	Kode dan No. Ser Faktur Pajak Yang Diangkitkan		
1	CV MULTI SIKNDO UTAMA	3147946420900	010.033-16.63300714	24-10-2016	2.800.000,00	280.000,00	0,00			
2	CV MULTI SIKNDO UTAMA	3147946420900	010.033-16.63300714	24-10-2016	500.000,00	50.000,00	0,00			
3	PT TOTAL DAYA	14860623429000	010.001-16.22878504	26-10-2016	2.780.412.375,00	278.041.238,00	0,00			
4	PT VENTURINDO	02727815433000	010.034-16.08550504	27-10-2016	974.465.864,00	97.446.586,00	0,00			
5	CV MULTI SIKNDO UTAMA	3147946420900	010.033-16.63300714	27-10-2016	0,00	0,00	0,00			
6	KOP KOKAR WIKIA	314220007000	010.033-16.89977335	26-10-2016	21.725.000,00	2.172.500,00	0,00			
7	KOP KOKAR WIKIA	314220007000	010.033-16.89977335	26-10-2016	4.783.333,00	478.333,00	0,00			
8	PT ERA SUMBER	73465020308000	010.034-16.14062416	14-10-2016	31.818.000,00	3.181.800,00	0,00			
9	PT SAYANA JEJARING	312331648429000	010.033-16.79654834	11-10-2016	8.163.265,00	816.327,00	0,00			
10	PT SAYANA JEJARING	312331648429000	010.033-16.79654818	29-09-2016	8.163.265,00	816.327,00	0,00			
11	PT SAYANA JEJARING	312331648429000	010.033-16.79654837	12-10-2016	15.500.000,00	1.550.000,00	0,00			
12	PT SAYANA JEJARING	312331648429000	010.033-16.79654836	12-10-2016	15.500.000,00	1.550.000,00	0,00			
13	PT LEMTATA GRAHAMATI	31546882045000	010.033-16.96605073	20-10-2016	75.100.000,00	7.510.000,00	0,00			
14	PT DWIMETRA SEZORTER	0331623140440000	010.034-16.02233644	20-10-2016	3.700.400,00	370.040,00	0,00			
15	PT UTAMA GAS MULTI	019530136401000	010.033-16.98417112	23-09-2016	12.300.000,00	1.230.000,00	0,00			
16	PT SINAR SURYA LESTARI	02805890390000	010.033-16.02684180	15-10-2016	78.000.000,00	7.800.000,00	0,00			
17	CV BANGUNGJAL ZAYK	716412487643000	010.034-16.15018284	15-10-2016	68.390.000,00	6.839.000,00	0,00			
18	CV BAROKAH ABAJI	015847038511000	010.033-16.72850814	17-10-2016	6.500.000,00	650.000,00	0,00			
19	PT MUFIDA FAJAR UTAMA	72592259543000	010.033-16.42153362	31-10-2016	22.836.364,00	2.283.636,00	0,00			
20	CV BAROKAH ABAJI	015847038511000	010.033-16.72850732	16-10-2016	20.600.000,00	2.060.000,00	0,00			
21	CV BAROKAH ABAJI	015847038511000	010.033-16.72850815	17-10-2016	41.000.000,00	4.100.000,00	0,00			
22	CV BANGUNGJAL ZAYK	716412487643000	010.032-16.89096308	31-10-2016	68.390.000,00	6.839.000,00	0,00			
23	CV BAROKAH ABAJI	015847038511000	010.033-16.72850815	17-10-2016	32.350.000,00	3.235.000,00	0,00			
24	CV BAROKAH ABAJI	015847038511000	010.033-16.72850824	25-10-2016	26.900.000,00	2.690.000,00	0,00			
25	CV KOTA BAYU MANDIRI	025962909417000	010.033-16.36477461	20-09-2016	8.063.750,00	806.375,00	0,00			
26	CV KOTA BAYU MANDIRI	025962909417000	010.033-16.36477442	20-09-2016	48.486.500,00	4.848.650,00	0,00			
27	PT DIRKANA DOLDES	028962402050000	010.033-16.80722028	10-10-2016	52.200.000,00	5.220.000,00	0,00			
28	PT METRO SUKSES	031279425216000	010.031-16.02682091	20-09-2016	78.796.000,00	7.879.600,00	0,00			
29	PT METRO SUKSES	031279425216000	010.031-16.02682092	20-10-2016	3.350.000,00	335.000,00	0,00			

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI								FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diangkitkan)		
MASA : 10 // 10 - 2018 (mm-yy-yyyy)			Pembetulan Ke : 1 ( satu )							
No	Nama Pengal BKP/ BKP Tidak Berwujud	NWPP	Kode dan Nomor Seri	Angka Pajak	DPP (Rp/ribu)	PPN (Rp/ribu)	PPnBM (Rp/ribu)	Kode dan No. Ser Faktur Pajak Yang Diangkitkan		
1	CV MULTI SIKNDO UTAMA	3147946420900	010.033-16.63300714	24-10-2016	2.800.000,00	280.000,00	0,00			
2	CV MULTI SIKNDO UTAMA	3147946420900	010.033-16.63300714	24-10-2016	500.000,00	50.000,00	0,00			
3	PT TOTAL DAYA	14860623429000	010.001-16.22878504	26-10-2016	2.780.412.375,00	278.041.238,00	0,00			
4	PT VENTURINDO	02727815433000	010.034-16.08550504	27-10-2016	974.465.864,00	97.446.586,00	0,00			
5	CV MULTI SIKNDO UTAMA	3147946420900	010.033-16.63300714	27-10-2016	0,00	0,00	0,00			
6	KOP KOKAR WIKIA	314220007000	010.033-16.89977335	26-10-2016	21.725.000,00	2.172.500,00	0,00			
7	KOP KOKAR WIKIA	314220007000	010.033-16.89977335	26-10-2016	4.783.333,00	478.333,00	0,00			
8	PT ERA SUMBER	73465020308000	010.034-16.14062416	14-10-2016	31.818.000,00	3.181.800,00	0,00			
9	PT SAYANA JEJARING	312331648429000	010.033-16.79654834	11-10-2016	8.163.265,00	816.327,00	0,00			
10	PT SAYANA JEJARING	312331648429000	010.033-16.79654818	29-09-2016	8.163.265,00	816.327,00	0,00			
11	PT SAYANA JEJARING	312331648429000	010.033-16.79654837	12-10-2016	15.500.000,00	1.550.000,00	0,00			
12	PT SAYANA JEJARING	312331648429000	010.033-16.79654836	12-10-2016	15.500.000,00	1.550.000,00	0,00			
13	PT LEMTATA GRAHAMATI	31546882045000	010.033-16.96605073	20-10-2016	75.100.000,00	7.510.000,00	0,00			
14	PT DWIMETRA SEZORTER	0331623140440000	010.034-16.02233644	20-10-2016	3.700.400,00	370.040,00	0,00			
15	PT UTAMA GAS MULTI	019530136401000	010.033-16.98417112	23-09-2016	12.300.000,00	1.230.000,00	0,00			
16	PT SINAR SURYA LESTARI	02805890390000	010.033-16.02684180	15-10-2016	78.000.000,00	7.800.000,00	0,00			
17	CV BANGUNGJAL ZAYK	716412487643000	010.034-16.15018284	15-10-2016	68.390.000,00	6.839.000,00	0,00			
18	CV BAROKAH ABAJI	015847038511000	010.033-16.72850814	17-10-2016	6.500.000,00	650.000,00	0,00			
19	PT MUFIDA FAJAR UTAMA	72592259543000	010.033-16.42153362	31-10-2016	22.836.364,00	2.283.636,00	0,00			
20	CV BAROKAH ABAJI	015847038511000	010.033-16.72850732	16-10-2016	20.600.000,00	2.060.000,00	0,00			
21	CV BAROKAH ABAJI	015847038511000	010.033-16.72850815	17-10-2016	41.000.000,00	4.100.000,00	0,00			
22	CV BANGUNGJAL ZAYK	716412487643000	010.032-16.89096308	31-10-2016	68.390.000,00	6.839.000,00	0,00			
23	CV BAROKAH ABAJI	015847038511000	010.033-16.72850815	17-10-2016	32.350.000,00	3.235.000,00	0,00			
24	CV BAROKAH ABAJI	015847038511000	010.033-16.72850824	25-10-2016	26.900.000,00	2.690.000,00	0,00			
25	CV KOTA BAYU MANDIRI	025962909417000	010.033-16.36477461	20-09-2016	8.063.750,00	806.375,00	0,00			
26	CV KOTA BAYU MANDIRI	025962909417000	010.033-16.36477442	20-09-2016	48.486.500,00	4.848.650,00	0,00			
27	PT DIRKANA DOLDES	028962402050000	010.033-16.80722028	10-10-2016	52.200.000,00	5.220.000,00	0,00			
28	PT METRO SUKSES	031279425216000	010.031-16.02682091	20-09-2016	78.796.000,00	7.879.600,00	0,00			
29	PT METRO SUKSES	031279425216000	010.031-16.02682092	20-10-2016	3.350.000,00	335.000,00	0,00			

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI								FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diangkitkan)		
MASA : 10 // 10 - 2018 (mm-yy-yyyy)			Pembetulan Ke : 2 ( dua )							
No	Nama Pengal BKP/ BKP Tidak Berwujud	NWPP	Kode dan Nomor Seri	Angka Pajak	DPP (Rp/ribu)	PPN (Rp/ribu)	PPnBM (Rp/ribu)	Kode dan No. Ser Faktur Pajak Yang Diangkitkan		
1	CV MULTI SIKNDO UTAMA	3147946420900	010.033-16.63300714	24-10-2016	2.800.000,00	280.000,00	0,00			
2	CV MULTI SIKNDO UTAMA	3147946420900	010.033-16.63300714	24-10-2016	500.000,00	50.000,00	0,00			
3	PT TOTAL DAYA	14860623429000	010.001-16.22878504	26-10-2016	2.780.412.375,00	278.041.238,00	0,00			
4	PT VENTURINDO	02727815433000	010.034-16.08550504	27-10-2016	974.465.864,00	97.446.586,00	0,00			
5	CV MULTI SIKNDO UTAMA	3147946420900	010.033-16.63300714	27-10-2016	0,00	0,00	0,00			
6	KOP KOKAR WIKIA	314220007000	010.033-16.89977335	26-10-2016	21.725.000,00	2.172.500,00	0,00			
7	KOP KOKAR WIKIA	314220007000	010.033-16.89977335	26-10-2016	4.783.333,00	478.333,00	0,00			
8	PT ERA SUMBER	73465020308000	010.034-16.14062416	14-10-2016	31.818.000,00	3.181.800,00	0,00			
9	PT SAYANA JEJARING	312331648429000	010.033-16.79654834	11-10-2016	8.163.265,00	816.327,00	0,00			
10	PT SAYANA JEJARING	312331648429000	010.033-16.79654818	29-09-2016	8.163.265,00	816.327,00	0,00			
11	PT SAYANA JEJARING	312331648429000	010.033-16.79654837	12-10-2016	15.500.000,00	1.550.000,00	0,00			
12	PT SAYANA JEJARING	312331648429000	010.033-16.79654836	12-10-2016	15.500.000,00	1.550.000,00	0,00			
13	PT LEMTATA GRAHAMATI	31546882045000	010.033-16.96605073	20-10-2016	75.100.000,00	7.510.000,00	0,00			
14	PT DWIMETRA SEZORTER	0331623140440000	010.034-16.02233644	20-10-2016	3.700.400,00	370.040,00	0,00			
15	PT UTAMA GAS MULTI	019530136401000	010.033-16.98417112	23-09-2016	12.300.000,00	1.230.000,00	0,00			
16	PT SINAR SURYA LESTARI	02805890390000	010.033-16.02684180	15-10-2016	78.000.000,00	7.800.000,00	0,00			
17	CV BANGUNGJAL ZAYK	716412487643000	010.034-16.15018284	15-10-2016	68.390.000,00	6.839.000,00	0,00			
18	CV BAROKAH ABAJI	015847038511000	010.033-16.72850814	17-10-2016	6.500.000,00	650.000,00	0,00			
19	PT MUFIDA FAJAR UTAMA	72592259543000	010.033-16.42153362	31-10-2016	22.836.364,00	2.283.636,00	0,00			
20	CV BAROKAH ABAJI	015847038511000	010.033-16.72850732	16-10-2016	20.600.000,00	2.060.000,00	0,00			
21	CV BAROKAH ABAJI	015847038511000	010.033-16.72850815	17-10-2016	41.000.000,00	4.100.000,00	0,00			
22	CV BANGUNGJAL ZAYK	716412487643000	010.032-16.89096308	31-10-2016	68.390.000,00	6.839.000,00	0,00			
23	CV BAROKAH ABAJI	015847038511000	010.033-16.72850815	17-10-2016	32.350.000,00	3.235.000,00	0,00			
24	CV BAROKAH ABAJI	015847038511000	010.033-16.72850824	25-10-2016	26.900.000,00	2.690.000,00	0,00			





DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI							FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diilangkan)	
MASA : 11 2016		Pembetulan Ke : 0		(mm-rr-yyyy)				
No.	Nama Pemilik BKP BKP Tidak Berwujud Pembeli JKP	NPWP	Faktor Pajak/Okumen Terukur Kode dan Nomor Seri Tanggal	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Otentik	
1	PT TOTAL DAYA	314062242000	010.001-16.22879505	30-11-2016	2.780.412.378,00	278.041.238,00	0,00	
2	CV MULTI BIKINDO UTAMA	01347946402000	010.033-16.63309616	33-11-2016	11.510.000,00	1.151.000,00	0,00	
3	CV MULTI BIKINDO UTAMA	01347946402000	010.033-16.63309616	34-11-2016	0,00	0,00	0,00	
4	PT VENTURINDO	02727681543300	010.034-16.06555060	35-11-2016	1.058.343.472,00	105.834.347,00	0,00	
5	KOP KOKAR WIKI PT HANSA CARIKUA	01341220007000 02779525504300	010.033-16.88997550 010.034-16.21542048	34-11-2016 30-11-2016	1.456.000,00 68.000.000,00	145.600,00 6.800.000,00	0,00 0,00	
6	PT IRADAT	01300816802300	010.033-16.61477361	37-11-2016	60.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
7	CV MULTI BIKINDO UTAMA	01347946402000	010.033-16.63309616	35-11-2016	10.800.000,00	1.080.000,00	0,00	
8	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.033-16.88997546	34-11-2016	1.500.000,00	150.000,00	0,00	
9	PT GEMERDA POKRIK SEMBERING, CLARISSA	11302201411000	010.036-16.86810483	36-11-2016	150.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
10	CV MULTI BIKINDO UTAMA	01347946402000	010.033-16.63309616	31-11-2016	26.000.000,00	2.600.000,00	0,00	
11	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.033-16.88997604	37-11-2016	750.000,00	75.000,00	0,00	
12	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.034-16.54745404	35-11-2016	750.000,00	75.000,00	0,00	
13	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.033-16.88997609	37-11-2016	30.525.000,00	3.052.500,00	0,00	
14	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.033-16.88997606	37-11-2016	8.500.000,00	850.000,00	0,00	
15	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.034-16.54745403	35-11-2016	730.000,00	73.000,00	0,00	
16	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.033-16.88997605	37-11-2016	32.303.226,00	3.230.323,00	0,00	
17	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.033-16.88997607	37-11-2016	46.500.000,00	4.650.000,00	0,00	
18	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.033-16.88997603	37-11-2016	13.250.000,00	1.325.000,00	0,00	
19	CV MULTI BIKINDO UTAMA	01347946402000	010.033-16.63309616	34-11-2016	2.700.000,00	270.000,00	0,00	
20	CV MULTI BIKINDO UTAMA	01347946402000	010.033-16.63309616	34-11-2016	16.750.000,00	1.675.000,00	0,00	
21	PT RESORNA PERKORAN	01737330903400	010.033-16.65490021	36-11-2016	61.750.000,00	6.175.000,00	0,00	
22	PT UNITED TRACTORS	11308246091000	010.033-16.90222740	37-11-2016	1.265.000.000,00	126.500.000,00	0,00	
23	PT LEMBITA GABAMAMA PT PRATOGA BINTANG	01254982040000 01254982040000	010.033-16.99595967 010.033-16.99595967	31-11-2016 31-11-2016	155.000.000,00 155.000.000,00	15.500.000,00 15.500.000,00	0,00 0,00	
24	PT PRATOGA BINTANG	01254982040000	010.033-16.99595967	31-11-2016	33.975.000,00	3.397.500,00	0,00	
25	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.033-16.88997197	23-09-2016	9.258.492,00	925.849,00	0,00	
26	PT MUTIARA JAYA ABADI	02005882209600	010.034-16.00011721	11-11-2016	89.499.892,00	8.949.985,00	0,00	
27	PT MUTIARA JAYA ABADI	02005882209600	010.034-16.00011718	11-11-2016	22.855.000,00	2.285.500,00	0,00	
28	PT MUTIARA JAYA ABADI	02005882209600	010.034-16.00011719	11-11-2016	55.427.500,00	5.542.750,00	0,00	
29	PT MUTIARA JAYA ABADI	02005882209600	010.034-16.00011717	11-11-2016	4.950.000,00	495.000,00	0,00	
JUMLAH				B2 >	5.010.251.030,00	501.025.103,00	0,00	

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI							FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diilangkan)	
MASA : 11 2016		Pembetulan Ke : 1		(mm-rr-yyyy)				
No.	Nama Pemilik BKP BKP Tidak Berwujud Pembeli JKP	NPWP	Faktor Pajak/Okumen Terukur Kode dan Nomor Seri Tanggal	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Otentik	
1	PT TOTAL DAYA	314062242000	010.001-16.22879505	30-11-2016	0,00	0,00	0,00	
2	CV MULTI BIKINDO UTAMA	01347946402000	010.033-16.63309616	33-11-2016	11.510.000,00	1.151.000,00	0,00	
3	CV MULTI BIKINDO UTAMA	01347946402000	010.033-16.63309616	34-11-2016	0,00	0,00	0,00	
4	PT VENTURINDO	02727681543300	010.034-16.06555060	35-11-2016	1.058.343.472,00	105.834.347,00	0,00	
5	KOP KOKAR WIKI PT HANSA CARIKUA	01341220007000 02779525504300	010.033-16.88997550 010.034-16.21542048	34-11-2016 30-11-2016	1.456.000,00 68.000.000,00	145.600,00 6.800.000,00	0,00 0,00	
6	PT IRADAT	01300816802300	010.033-16.61477361	37-11-2016	60.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
7	CV MULTI BIKINDO UTAMA	01347946402000	010.033-16.63309616	35-11-2016	10.800.000,00	1.080.000,00	0,00	
8	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.033-16.88997546	34-11-2016	1.500.000,00	150.000,00	0,00	
9	PT GEMERDA POKRIK SEMBERING, CLARISSA	11302201411000	010.036-16.86810483	36-11-2016	150.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
10	CV MULTI BIKINDO UTAMA	01347946402000	010.033-16.63309616	31-11-2016	26.000.000,00	2.600.000,00	0,00	
11	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.033-16.88997604	37-11-2016	750.000,00	75.000,00	0,00	
12	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.034-16.54745404	35-11-2016	750.000,00	75.000,00	0,00	
13	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.033-16.88997609	37-11-2016	30.525.000,00	3.052.500,00	0,00	
14	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.033-16.88997606	37-11-2016	8.500.000,00	850.000,00	0,00	
15	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.034-16.54745403	35-11-2016	730.000,00	73.000,00	0,00	
16	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.033-16.88997605	37-11-2016	32.303.226,00	3.230.323,00	0,00	
17	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.033-16.88997607	37-11-2016	46.500.000,00	4.650.000,00	0,00	
18	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.033-16.88997603	37-11-2016	13.250.000,00	1.325.000,00	0,00	
19	CV MULTI BIKINDO UTAMA	01347946402000	010.033-16.63309616	34-11-2016	2.700.000,00	270.000,00	0,00	
20	CV MULTI BIKINDO UTAMA	01347946402000	010.033-16.63309616	34-11-2016	16.750.000,00	1.675.000,00	0,00	
21	PT RESORNA PERKORAN	01737330903400	010.033-16.65490021	36-11-2016	61.750.000,00	6.175.000,00	0,00	
22	PT UNITED TRACTORS	11308246091000	010.033-16.90222740	37-11-2016	1.265.000.000,00	126.500.000,00	0,00	
23	PT LEMBITA GABAMAMA PT PRATOGA BINTANG	01254982040000 01254982040000	010.033-16.99595967 010.033-16.99595967	31-11-2016 31-11-2016	155.000.000,00 155.000.000,00	15.500.000,00 15.500.000,00	0,00 0,00	
24	PT PRATOGA BINTANG	01254982040000	010.033-16.99595967	31-11-2016	33.975.000,00	3.397.500,00	0,00	
25	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.033-16.88997197	23-09-2016	9.258.492,00	925.849,00	0,00	
26	PT MUTIARA JAYA ABADI	02005882209600	010.034-16.00011721	11-11-2016	89.499.892,00	8.949.985,00	0,00	
27	PT MUTIARA JAYA ABADI	02005882209600	010.034-16.00011718	11-11-2016	22.855.000,00	2.285.500,00	0,00	
28	PT MUTIARA JAYA ABADI	02005882209600	010.034-16.00011719	11-11-2016	55.427.500,00	5.542.750,00	0,00	
29	PT MUTIARA JAYA ABADI	02005882209600	010.034-16.00011717	11-11-2016	4.950.000,00	495.000,00	0,00	

DAFTAR PAJAK MASUKAN YANG DAPAT DIKREDITKAN ATAS PEROLEHAN BKP/JKP DALAM NEGERI							FORMULIR 1111 B2 (Bila tidak ada transaksi tidak perlu diilangkan)	
MASA : 12 2016		Pembetulan Ke : 0		(mm-rr-yyyy)				
No.	Nama Pemilik BKP BKP Tidak Berwujud Pembeli JKP	NPWP	Faktor Pajak/Okumen Terukur Kode dan Nomor Seri Tanggal	DPP (Rupiah)	PPN (Rupiah)	PPnBM (Rupiah)	Kode dan No. Seri Faktur Pajak Yang Diganti/Otentik	
1	PT SUKSES MACU	03089671032000	010.032-16.95439883	30-11-2016	9.578.400,00	957.840,00	0,00	
2	PT KELMER INDONESIA	02593651902800	010.033-16.52331083	10-11-2016	115.000.000,00	11.500.000,00	0,00	
3	PT PESASO RANI	01487881100700	010.033-16.28630851	36-12-2016	375.000.000,00	37.500.000,00	0,00	
4	PT VENTURINDO	02727681543300	010.034-16.56094202	35-12-2016	1.984.788.945,00	198.478.894,00	0,00	
5	KOP KOKAR WIKI PT PESASO RANI	01341220007000 01487881100700	010.034-16.72751412 010.033-16.28630856	35-12-2016 35-12-2016	6.750.000,00 937.500.000,00	675.000,00 93.750.000,00	0,00 0,00	
6	CV MANUNGJAL JAYA	75041248764300	010.034-16.15019313	35-11-2016	68.380.000,00	6.838.000,00	0,00	
7	PT AGUNG JAYA	01860281612000	010.034-16.63852666	31-12-2016	164.014.300,00	16.401.430,00	0,00	
8	PT JUTUN INDONESIA	01071174052000	010.034-16.46011501	31-12-2016	12.088.000,00	1.208.800,00	0,00	
9	PT TEHNIK NUSANTARA	03009968471000	010.034-16.03107059	36-12-2016	68.250.000,00	6.825.000,00	0,00	
10	PT TEHNIK NUSANTARA	03009968471000	010.034-16.03107062	36-12-2016	68.250.000,00	6.825.000,00	0,00	
11	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.034-16.54745404	34-11-2016	7.170.000,00	717.000,00	0,00	
12	PT ASTRA GRAPHIS	01307261054000	010.034-16.50694438	36-12-2016	11.262.175,00	1.126.217,00	0,00	
13	KOP KOKAR WIKI	01341220007000	010.034-16.54745415	36-12-2016	28.000.000,00	2.800.000,00	0,00	
14	PT PROBRODIT MOJO	02747742104300	011.034-16.48673180	37-12-2016	88.433.125,00	8.843.313,00	0,00	10.034-16.48673180
15	CV KOTA BARU MANUNGJAL	02562026941700	010.033-16.36477114	35-09-2016	0,00	0,00	0,00	
16	CV KOTA BARU MANUNGJAL	02562026941700	011.033-16.36477114	35-09-2016	1.530.000,00	153.000,00	0,00	10.033-16.36477114
17	PT SUPRA PRIMATAMA	01967024907300	16121007069	30-12-2016	2.000.000,00	200.000,00	0,00	
18	PT Supra Primatama	01967024907300	16098888609	35-09-2016	6.400.000,00	640.000,00	0,00	
JUMLAH				B2 >	5.010.251.030,00	501.025.103,00	0,00	

Penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah, a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKIKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKIKG.



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

## LAMPIRAN 8

### Terkait Bukti Pembayaran atas kurang potong

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

05/11/2021 10:19:39

PEMBAYARAN 50013 CETAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA

NOOR TRANSAKSI : 910582211051022175305  
 TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 05/11/2021 10:19:38 AM  
 SUMBER DANA : CASH  
 PENYEDIA JASA : 50013 - 50013 CETAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA  
 STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN PAJAK  
 DATA PEMBAYARAN :  
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 05/11/2021 10:19:02  
 TANGGAL BUKU : 05/11/21  
 KODE OBANG BANK : 000008  
 NIB : 29101003317  
 NIPN : 544724UMURKPP  
 STAN : 033717  
 DATA SETORAN : 02580071825113  
 KODE BILLING : 013562911062000  
 NAMA WALIB PAJAK :  
 ALAMAT :  
 NOOR CELEK PAJAK :  
 MATA ANGGARAN : 411124  
 JENIS SETORAN : 104  
 NISA PAJAK : 01012016  
 NOOR KETETAPAN : 00000000000000  
 JUMLAH SETORAN : RP. 1,356,756.00  
 MATA UANG : IDR  
 TERBELANG : SATU JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU TUjuh RATUS  
 KETERANGAN : NPP

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	1,356,756.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 0.00  
 ADMIN BANK : 0.00  
 TOTAL BAYAR : 0.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank: 0000 000054 31 11 05/11/2021 10:19:38 AM 7114  
 CASH 50013 CETAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA IDR 1,356,756.00  
 50013 - 50013 CETAK BUKTI PENERIMAAN NEGARA IDR 1,356,756.00 CR  
 BILL REF 910582211051022175305  
 CUSTOMER CHARGE IDR 0.00  
 FFFFFF 02580071825113 PENERIMAAN PAJAK

05/11/2021 10:50:31

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PHEP/OLKAT

NOOR TRANSAKSI : 910582211051053012321  
 TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 05/11/2021 10:50:31 AM  
 SUMBER DANA : CASH  
 PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/OLKAT  
 STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN PAJAK  
 DATA PEMBAYARAN :  
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 05/11/2021 10:50:31  
 TANGGAL BUKU : 05/11/21  
 KODE OBANG BANK : 008  
 NIB : 65961304468  
 NIPN : 293301PHEO10001  
 STAN : 91194  
 DATA SETORAN : 02580060611102  
 KODE BILLING :  
 NAMA WALIB PAJAK :  
 ALAMAT :  
 NOOR CELEK PAJAK :  
 MATA ANGGARAN : 411124  
 JENIS SETORAN : 104  
 NISA PAJAK : 01012016  
 NOOR KETETAPAN : 00000000000000  
 JUMLAH SETORAN : RP. 1,356,756.00  
 MATA UANG : IDR  
 TERBELANG : SATU JUTA TIGA RATUS LIMA PULUH DELAPAN RIBU TUjuh RATUS  
 KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEKERLUKAN NPP

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	1,356,756.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 1,356,756.00  
 ADMIN BANK : 0.00  
 TOTAL BAYAR : 1,356,756.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank: 0000 000054 47 12 05/11/2021 10:50:31 AM 7114  
 INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEKERLUKAN NPP  
 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/OLKAT IDR 1,356,756.00 CR  
 BILL REF 910582211051053012321  
 CUSTOMER CHARGE IDR 0.00  
 FFFFFF 02580060611102 PENERIMAAN PAJAK

05/11/2021 10:52:11

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PHEP/OLKAT

NOOR TRANSAKSI : 91058221105105403923  
 TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 05/11/2021 10:52:11 AM  
 SUMBER DANA : CASH  
 PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/OLKAT  
 STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN PAJAK  
 DATA PEMBAYARAN :  
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 05/11/2021 10:52:11  
 TANGGAL BUKU : 05/11/21  
 KODE OBANG BANK : 008  
 NIB : 548217045021  
 NIPN : 0023156632PGL6  
 STAN : 29329  
 DATA SETORAN : 02580078220288  
 KODE BILLING :  
 NAMA WALIB PAJAK :  
 ALAMAT :  
 NOOR CELEK PAJAK :  
 MATA ANGGARAN : 411124  
 JENIS SETORAN : 104  
 NISA PAJAK : 12122016  
 NOOR KETETAPAN : 00000000000000  
 JUMLAH SETORAN : RP. 342,000.00  
 MATA UANG : IDR  
 TERBELANG : TIGA RATUS SEPATIS PULUH DUA RIBU RUPIAH  
 KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEKERLUKAN NPP

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	342,000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 342,000.00  
 ADMIN BANK : 0.00  
 TOTAL BAYAR : 342,000.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank: 0000 000054 69 19 05/11/2021 10:52:11 AM 7114  
 CASH 50012 PAJAK/PHEP/OLKAT IDR 342,000.00  
 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/OLKAT IDR 342,000.00 CR  
 BILL REF 91058221105105403923  
 CUSTOMER CHARGE IDR 0.00  
 FFFFFF 02580078220288 PENERIMAAN PAJAK

05/11/2021 10:48:57

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PHEP/OLKAT

NOOR TRANSAKSI : 910582211051051229502  
 TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 05/11/2021 10:48:57 AM  
 SUMBER DANA : CASH  
 PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/OLKAT  
 STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN PAJAK  
 DATA PEMBAYARAN :  
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 05/11/2021 10:48:57  
 TANGGAL BUKU : 05/11/21  
 KODE OBANG BANK : 008  
 NIB : 403412043954  
 NIPN : AAT1262087JPSV  
 STAN : 557938  
 DATA SETORAN : 02580058820015  
 KODE BILLING :  
 NAMA WALIB PAJAK :  
 ALAMAT :  
 NOOR CELEK PAJAK :  
 MATA ANGGARAN : 411124  
 JENIS SETORAN : 104  
 NISA PAJAK : 12122016  
 NOOR KETETAPAN : 00000000000000  
 JUMLAH SETORAN : RP. 3,394,196.00  
 MATA UANG : IDR  
 TERBELANG : TIGA JUTA SEPATIS TUjuh PULUH DELAPAN RIBU SEPATIS  
 KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEKERLUKAN NPP

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	3,394,196.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 3,394,196.00  
 ADMIN BANK : 0.00  
 TOTAL BAYAR : 3,394,196.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank: 0000 000054 65 09 05/11/2021 10:48:57 AM 7114  
 CASH 50012 PAJAK/PHEP/OLKAT IDR 3,394,196.00  
 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/OLKAT IDR 3,394,196.00 CR  
 BILL REF 910582211051051229502  
 CUSTOMER CHARGE IDR 0.00  
 FFFFFF 02580058820015 PENERIMAAN PAJAK

05/11/2021 10:45:43

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PHEP/OLKAT

NOOR TRANSAKSI : 91058221105104870269  
 TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 05/11/2021 10:45:43 AM  
 SUMBER DANA : CASH  
 PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/OLKAT  
 STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN PAJAK  
 DATA PEMBAYARAN :  
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 05/11/2021 10:45:43  
 TANGGAL BUKU : 05/11/21  
 KODE OBANG BANK : 008  
 NIB : 21808042814  
 NIPN : 5045511TRUCCH  
 STAN : 533008  
 DATA SETORAN : 02580064132017  
 KODE BILLING :  
 NAMA WALIB PAJAK :  
 ALAMAT :  
 NOOR CELEK PAJAK :  
 MATA ANGGARAN : 411124  
 JENIS SETORAN : 104  
 NISA PAJAK : 10102016  
 NOOR KETETAPAN : 00000000000000  
 JUMLAH SETORAN : RP. 2,176,308.00  
 MATA UANG : IDR  
 TERBELANG : DUA JUTA SEPATIS TUjuh PULUH DELAPAN RIBU TIGA RATUS DEL  
 KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEKERLUKAN NPP

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	2,176,308.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 2,176,308.00  
 ADMIN BANK : 0.00  
 TOTAL BAYAR : 2,176,308.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank: 0000 000054 61 17 05/11/2021 10:45:43 AM 7114  
 CASH 50012 PAJAK/PHEP/OLKAT IDR 2,176,308.00  
 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/OLKAT IDR 2,176,308.00 CR  
 BILL REF 91058221105104870269  
 CUSTOMER CHARGE IDR 0.00  
 FFFFFF 02580064132017 PENERIMAAN PAJAK

05/11/2021 10:47:22

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PHEP/OLKAT

NOOR TRANSAKSI : 910582211051049536108  
 TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 05/11/2021 10:47:22 AM  
 SUMBER DANA : CASH  
 PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/OLKAT  
 STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN PAJAK  
 DATA PEMBAYARAN :  
 TANGGAL DAN JAM BAYAR : 05/11/2021 10:47:22  
 TANGGAL BUKU : 05/11/21  
 KODE OBANG BANK : 008  
 NIB : 80704034389  
 NIPN : 525200F368LDJ4  
 STAN : 525508  
 DATA SETORAN : 02580064919140  
 KODE BILLING :  
 NAMA WALIB PAJAK :  
 ALAMAT :  
 NOOR CELEK PAJAK :  
 MATA ANGGARAN : 411124  
 JENIS SETORAN : 104  
 NISA PAJAK : 11112016  
 NOOR KETETAPAN : 00000000000000  
 JUMLAH SETORAN : RP. 289,756.00  
 MATA UANG : IDR  
 TERBELANG : DUA RATUS DELAPAN PULUH SEPATIS TUjuh RATUS LIMA I  
 KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEKERLUKAN NPP

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	289,756.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 289,756.00  
 ADMIN BANK : 0.00  
 TOTAL BAYAR : 289,756.00

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank: 0000 000054 63 18 05/11/2021 10:47:22 AM 7114  
 CASH 50012 PAJAK/PHEP/OLKAT IDR 289,756.00  
 50012 - 50012 PAJAK/PHEP/OLKAT IDR 289,756.00 CR  
 BILL REF 910582211051049536108  
 CUSTOMER CHARGE IDR 0.00  
 FFFFFF 02580064919140 PENERIMAAN PAJAK



**BUKTI PENERIMAAN NEGARA**  
**Penerimaan Pajak**

Data Pembayaran			
Tanggal dan Jam Bayar	: 29/09/2021 18:12:16	NTB	: 575972135057
Tanggal Buku	: 30/09/21	NTPN	: D9B3A1P18P9IUHFM
Kode Cabang Bank	: 008	STAN	: 994202
Data Setoran			
Kode Billing	: 025602461681142		
NPWP	: 013662911062000		
Nama Wajib Pajak	:		
Alamat	:		
Npwp Penyetor	:		
Kota	:		
Nomor Objek Pajak	: -		
Mata Anggaran	:		
Jenis Setoran	:		
Jumlah	: Rp. 6,800,000.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: enam juta delapan ratus ribu rupiah		
Nomor Ketetapan	: 000000000000000		
Jenis Ketetapan	:		
Masa Pajak	: November - November		
Tahun Pajak	: 2016		
Remark	:		
Customer Reference Number	:		
Extended Payment Detail	:		

**BUKTI PENERIMAAN NEGARA**  
**Penerimaan Pajak**

Data Pembayaran			
Tanggal dan Jam Bayar	: 29/09/2021 18:02:14	NTB	: 121812133721
Tanggal Buku	: 30/09/21	NTPN	: 62B291P18P9J6H82
Kode Cabang Bank	: 008	STAN	: 925678
Data Setoran			
Kode Billing	: 025602461943042		
NPWP	: 013662911062000		
Nama Wajib Pajak	:		
Alamat	:		
Npwp Penyetor	:		
Kota	:		
Nomor Objek Pajak	: -		
Mata Anggaran	:		
Jenis Setoran	:		
Jumlah	: Rp. 13,850,000.00	Mata Uang	: IDR
Terbilang	: tiga belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah		
Nomor Ketetapan	: 000000000000000		
Jenis Ketetapan	:		
Masa Pajak	: Desember - Desember		
Tahun Pajak	: 2016		
Remark	:		
Customer Reference Number	:		
Extended Payment Detail	:		

**Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

menyampaikan Nomor Faktur **010.009-17.06133676** dan Nomor Faktur **010.009-17.06133677**, telah dibayarkan melalui kami dengan lampiran SPT Masa PPN 2017 dan PT. Wijaya Karya Rekraya Konstruksi tagihan PPN yang belum dibayar sampai saat ini sebagai berikut :

No.	No Faktur	Tanggal	PPN
1	010.009-17.06133679	21-02-2017	Rp 300,571,727.00
2	010.009-17.06133680	21-02-2017	Rp 206,686,658.00
3	010.009-17.06133681	21-02-2017	Rp 247,147,766.00
4	010.009-17.06133682	21-02-2017	Rp 278,041,238.00
Jumlah			<b>Rp 1,032,447,389.00</b>

Terbilang : **(Satu Miliar Tiga Puluh Dua Juta Empat Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah)**, Dimohon untuk segera melunasi sebelum Tanggal 29 September 2021 sesuai dengan ID Billing yang sudah dibuatkan oleh KPP Madya Dua Bandung.

- Berikut kami lampirkan :
- SPT Masa PPN Oktober dan November 2016
  - SPT Masa PPN Januari dan Februari 2017

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bandung, 22 September 2021

Hormat Kami,  
**PT. Total Daya**  
  
Email Hasan  
Direktur Utama

Nomor : 127-P/TD/IX/2021 Bandung, 22 September 2021  
Lampiran : 1 (berkas)  
Kepada Yth :  
Jl. D. Parakan Kav. 2, Jakarta 13340

Dengan Hormat,  
Sehubungan dengan menjawab surat Nomor : SE.01.03/WRK.MKU.XI/2021 perihal Permintaan **SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2016** dengan ini dijelaskan bahwa nomor faktur 010.001-16.22878504 dan nomor faktur 010.001-16.22878505 dengan rincian sebagai berikut :

No	No Faktur	Tanggal	Periode	Uang	PPN	Stok	Tanggal	Periode	Uang	PPN	Uang	Tanggal	Periode
01	010.001-16.22878504	01.09.2016	01.09.2016 - 30.09.2016	2.780.412.876,00	278.041.288,00	0	01.09.2016	01.09.2016 - 30.09.2016	2.780.412.876,00	278.041.288,00	0	01.09.2016	01.09.2016 - 30.09.2016
02	010.001-16.22878505	01.09.2016	01.09.2016 - 30.09.2016	2.780.412.876,00	278.041.288,00	0	01.09.2016	01.09.2016 - 30.09.2016	2.780.412.876,00	278.041.288,00	0	01.09.2016	01.09.2016 - 30.09.2016
03	010.001-16.22878506	01.09.2016	01.09.2016 - 30.09.2016	2.780.412.876,00	278.041.288,00	0	01.09.2016	01.09.2016 - 30.09.2016	2.780.412.876,00	278.041.288,00	0	01.09.2016	01.09.2016 - 30.09.2016
04	010.001-16.22878507	01.09.2016	01.09.2016 - 30.09.2016	2.780.412.876,00	278.041.288,00	0	01.09.2016	01.09.2016 - 30.09.2016	2.780.412.876,00	278.041.288,00	0	01.09.2016	01.09.2016 - 30.09.2016

Nomor faktur 010.001-16.22878504 dan Nomor Faktur 010.001-16.22878505 dibatalkan karena pada bulan tersebut tidak ada pembayaran dari pihak PT. maka dari itu pihak kami membatalkan status faktur tersebut dan digantikan pada bulan Januari dan Februari tahun 2017 sesuai dengan tabel di atas

Atas permintaan dari ..... dengan Nomor Faktur **010.009-17.06133676** dan Nomor Faktur 010.009-17.06133682.

Tanah Bee Hive Office, Floor 2, Jl. D.I. Parjatan Kav. 2, Jakarta 13340 - Indonesia, Phone : (62) 21 4200 4440 - 6, website : www.waterson.co.id  
Nomor : SE.01.10/WRK.MKU.IX/2021 Jakarta, 24 September 2021  
Lampiran : (1) (satu) set

Kepada Yth :  
**Direktur Utama PT Total Daya**  
Grand Antapany Town House No. A-2,  
Parakan Sati Bandung - 40291.

Perihal: **Konfirmasi Faktur PT Total Daya**

- Dengan Hormat,  
Berdasarkan :
- Surat PT Total Daya Nomor : 127-P/TD/IX/2021 tanggal 22 September 2021.
  - Surat tanggal 24 September 2021.
  - Surat permohonan Penyelesaian PPN Nomor dari PT Total Daya Tanggal 03 September 2021.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka dengan ini kami tegaskan bahwa **tidak ada sisa outstanding tagihan PPN** PT Total Daya kepada kami dan selanjutnya kami informasikan bahwa kami sudah melakukan pembayaran pada tahun 2017 sebagaimana dapat dilihat dalam Rekap Lampiran Konfirmasi Pembayaran Faktur PT Total Daya Tahun 2016 dan Tahun 2017 yang terlampir pada surat ini.

Adapun diketahui bahwa terjadi pergantian Faktur Pajak secara sepihak pada tahun 2016 menjadi tahun 2017 oleh PT Total Daya, kami minta agar segala sanksi denda perpajakan dan resiko lainnya yang diakibatkan karena tidak adanya konfirmasi atas pergantian faktur sepihak menjadi tanggung jawab PT. Total Daya.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan Terima Kasih.

Hormat Kami,

  
Manajer Akuntansi, Keuangan dan Pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
- Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Konsultasi dan Informatika Kwik Kian Gie

